

**AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN AIR
BERSIH PDAM WAY SEKAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tesis)

Oleh

**ULFA UMAYASARI
NPM 1926021013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN AIR BERSIH PDAM WAY SEKAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

ULFA UMASARI

Air bersih merupakan barang publik yang aksesibilitas ketersediaannya menjadi wujud dari pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Masalah penelitian ini berangkat dari aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih yang jangkauannya masih terbatas di Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis aksesibilitas terhadap ketersediaan air bersih produksi PDAM Kabupaten Pringsewu yang hanya menjangkau dua kecamatan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan informan penelitian bersumber dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, PDAM Way Sekampung, Pamsimas, aktivis serta masyarakat pelanggan PDAM. Penelitian ini menggunakan konsep aksesibilitas air bersih dan *water governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu belum memberikan pemerataan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. PDAM Way Sekampung hanya mampu mendistribusi air di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo dari seluruh total kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 9 (sembilan) kecamatan. Belum adanya pemerataan aksesibilitas tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu; jumlah (volume) air yang dibutuhkan masyarakat cenderung besar sedangkan PDAM memiliki keterbatasan sumber air bersih, jarak dan waktu tempuh air bersih tersalurkan yang berbeda tingkat aksesibilitasnya, kualitas dan harga (tarif) air bersih yang belum sepadan, serta perlu kecermatan pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan skala prioritas wilayah atau kecamatan agar dapat memaksimalkan aksesibilitas air bersih. Sebab inferensi yang didapat aksesibilitas ketersediaan air bersih memerlukan tata kelola penyediaan air bersih yang baik. Terutama butuh kerjasama antara Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu serta PDAM Way Sekampung, agar ke depan seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu dapat terakses air bersih dari PDAM Way Sekampung secara bertahap dan merata.

Kata Kunci : Air Bersih, Aksesibilitas, *Water Governance*

ABSTRACT

COMMUNITY ACCESS TO CLEAN WATER AVAILABILITY OF PDAM WAY SEKAMPUNG IN PRINGSEWU REGENCY

By

ULFA UMAYASARI

Clean water is a public good whose accessibility is a manifestation of the government's public service to the community. The problem of this research departs from the accessibility of the community to the availability of clean water whose reach is still limited in the Pringsewu Regency. The purpose of this study is to analyze the accessibility of the availability of clean water produced by PDAM Pringsewu Regency which only reaches two sub-districts. This study uses a qualitative descriptive type with research informants sourced from the Head of the Human Settlements Division of the PUPR Office of Pringsewu Regency, PDAM Way Sekampung, Pamsimas, activists, and PDAM customer communities. This research uses the concept of clean water accessibility and water governance. The results of the study indicate that the availability of clean water in the Pringsewu Regency has not provided equal accessibility for all communities. PDAM Way Sekampung is only able to distribute water in two sub-districts, namely Pringsewu and Gadingrejo sub-districts out of the total 9 (nine) sub-districts in Pringsewu Regency. The lack of equal distribution of accessibility is due to several factors, namely; the amount (volume) of water needed by the community tends to be large, while PDAM have limited sources of clean water, the distance and travel time for distributed clean water are of different levels of accessibility, quality and price (fare) of clean water are not commensurate, and local governments need to be careful in determining regional or sub-district priority scale policies to maximize the accessibility of clean water. Because the inference obtained is the accessibility of clean water availability requires good management of clean water supply. In particular, it requires cooperation between the PUPR Office of Pringsewu Regency and PDAM Way Sekampung, so that in the future all sub-districts in Pringsewu Regency can access clean water from PDAM Way Sekampung in stages and evenly.

Keywords: Clean Water, Accessibility, Water Governance

**AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN AIR
BERSIH PDAM WAY SEKAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

ULFA UMASARI

NPM 1926021013

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : **AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP
KETERSEDIAAN AIR BERSIH PDAM WAY
SEKAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Ulfa Umayasari**

No. Pokok Mahasiswa : **1926021013**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP.

NIP. 19780430 200812 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hertanto', is written over the text of the second signatory.

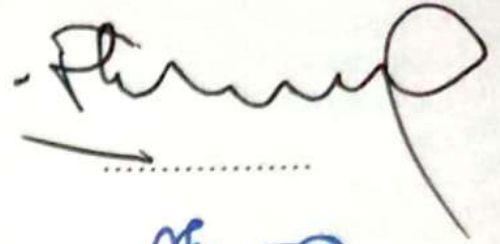
Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D.

NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

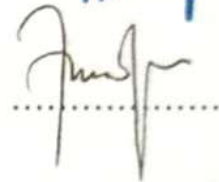
Ketua : **Dr. Syarief Makhya**



Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP.**



Anggota : **Dr. Tabah Maryanah**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **10 Desember 2021**

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : “Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya Penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam ketentuan akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Desember 2021



Ulfa Umayasari

NPM. 1926021013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ulfa Umayasari, merupakan anak pertama dari tiga perempuan bersaudara. Lahir di Pringsewu pada tanggal 26 Maret 1996 dari pasangan Bapak Sigit Budiarto, S.Pd dan Ibu Rukayanti. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Aisyiyah II Pringsewu tahun 2001-2002, penulis melanjutkan di SD Muhammadiyah Pringsewu tahun 2002-2008, setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2008-2011, sedangkan pada tahun 2011-2014 Penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pringsewu. Pertengahan tahun 2014, Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur tanpa tes yaitu SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) atau disebut jalur undangan dan mampu menuntaskan gelar sarjana pada pertengahan tahun 2018 dengan predikat *cumlaude*.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019, Penulis melanjutkan kembali jenjang pendidikan dengan mendaftar di program studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur beasiswa dari Universitas Lampung dengan mengambil konsentrasi Manajemen Pemerintahan. Selama menempuh pendidikan magister, Penulis terlibat dalam beberapa penelitian dan penulisan. Diantaranya turut berkontribusi dalam menulis *Book Chapter* “Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 - Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif” yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

MOTO

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim)

“Setiap orang yang kau temui adalah guru, dan setiap tempat yang kau datangi adalah sekolah” (Ki Hajar Dewantara)

“Jika gagal merencanakan = merencanakan kegagalan” (Anonim)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah dan harapan untuk Penulis agar mampu menyelesaikan tesis ini.

Berbekal rasa cinta dan hormat, tesis ini dipersembahkan untuk :

Kedua Orang Tua Terkasih

Sigit Budiarto, S.Pd dan Rukayanti

Terimakasih telah memberikan pelajaran hidup bermakna yang menguatkan pribadi buah hati dan telah berkorban materi serta berpacu dengan lelah demi kami anak-anaknya agar bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil yang baik tanpa kurang suatu apapun.

Kedua Adik Tersayang

Nabila Febrianti dan Novira Anggraini

Keluarga Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Angkatan 2019

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menuntaskan tesis ini.

Penulisan tesis yang berjudul “**Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu**” ini merupakan syarat bagi Penulis untuk mampu mencapai gelar Magister di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis begitu menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, serta jauh dari kata sempurna. Sebab Penulis memiliki keterbatasan dan kemampuan yang berbeda dari penulis lainnya. Ikhwal tersebut, Penulis sangat terbuka jika terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan tesis ini. Selain itu, Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi langkah awal atau sebagai batu loncatan bagi Peneliti lainnya yang sedang meneliti topik serupa dengan judul tesis ini.

Tidak dipungkiri, tesis ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa keterlibatan dan bantuan serta dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi para alumni Unila meraih program beasiswa pascasarjana.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Hertanto, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, apresiasi dan amanah yang pernah diberikan.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan tesis Penulis yang sangat berperan memberikan banyak arahan serta masukan sebagai langkah awal memulai penulisan tesis ini. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT serta senantiasa diberikan kesehatan dan akan terus menciptakan banyak karya melalui tulisan-tulisan kritis yang mampu memotivasi mahasiswa untuk mengikuti jejak beliau.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan tesis Penulis. Terimakasih tak terhingga Penulis haturkan kepada beliau atas segala bentuk dukungan moral, motivasi, kritik dan saran yang sangat berguna bagi Penulis, serta nasehat yang selama ini diberikan kepada kami selaku mahasiswanya untuk selalu optimis dan yakin bahwa kesuksesan akan mampu diraih oleh mereka yang mau bekerja keras.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Dosen Penguji dalam setiap tahapan proses menuntaskan tesis ini, yang selalu menumpahkan kritik dan saran disertai solusi bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terimakasih tak terhingga kepada beliau atas segala bentuk motivasi dan arahan yang sangat membangun.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Terkhusus Dosen pada konsentrasi Manajemen Pemerintahan Bapak Dr. Pitojo Budiono, Ibu Dr. Feni Rosalia, Bapak alm. Prof. Sindung P. Haryanto. Serta tak lupa Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan yang telah mendampingi dan mengarahkan Penulis dalam proses menyusun hingga terbitnya jurnal pertama Penulis. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam menuntaskan amanah terbaik sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan FISIP Unila. serta terimakasih tak terhingga kepada Bapak Arizka Warganegara, P.hD. yang selalu memotivasi Penulis untuk melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan Penulis.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Terkhusus untuk Mbak Yeri, Mbak Febri dan Mbak Nisa serta Mas Andi, Mas Dede dan Mas Hendro yang telah membantu Penulis dalam banyak hal keperluan yang berkaitan dengan administrasi dan teknis kebutuhan perkuliahan.
10. Seluruh informan yang telah membantu Penulis memberikan informasi secara lengkap baik berupa memfasilitasi pertemuan hingga kebutuhan data yang dibutuhkan. Terimakasih kepada Ibu Araina Dwi Rustiani selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, Ibu Rini Andalusia selaku Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu serta Bapak Iwan, tak lupa Mbak Alma, Pak Yendy, dan Bapak Empi selaku Tim Pamsimas, serta Bapak Edy Karizal selaku aktivis yang melengkapi bahan analisis juga pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan. Penulis mengucapkan terimakasih atas seluruh kemudahan dan bantuan informasi yang diberikan demi penyusunan tesis ini.
11. Sahabat dan rekan terdekat Penulis, Miftachul Husna, Ni'mah Aulia Hidayah, Azza Kiasati, Meriyantika Eka Fithri, Elyta, Theo Reynol Sandy, Malik Al Hafiz, Andri Agung Saputra, Al'Araaf Yusuf, Eliyas Yahya, Shohib Abdul Aziz terimakasih atas bantuan waktu dan berbagi pengalaman selama ini.
12. Rekan di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Terimakasih Penulis ucapkan terkhusus kepada mahasiswa konsentrasi Manajemen Pemerintahan M. Fajar Novriansyah, Ni Kadek Poniasih, Bang Danni Pangaribowo, Bang Tiyas Apriza, dan Zenith Nafigati. Tidak lupa rekan lainnya Khairunnisa Maulida dan Ahmad Robi Ulzikri serta Mas Sidiq, Mas Tri, Bang Ardy, Bang Vico. Serta Mbak dan Abang yang selalu memberikan petunjuk hidup yang bermanfaat bagi kami generasi yang belum berumahtangga, terimakasih kepada Mbak Dini, Mbak Retty, Mbak Narita, Mbak Meli, Mbak Mauli, Mbak Asri, Bang Taufik, Bang Wahir, Bang

Alfarabi, Pak Ma'sum, Pak Hendri serta seluruh rekan MIP di angkatan berbeda yang mohon maaf tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu namun telah memberikan *sharing* ilmu dan bantuan selama ini kepada Penulis.

13. Seluruh pihak yang telah membantu kemudahan dan kelancaran selama proses penyusunan tesis ini, yang dengan keterbatasan Penulis tidak bisa menyebutkan keseluruhan nama. Sekali lagi Penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata, Penulis berharap tesis ini mampu menjadi pintu awal terbukanya gagasan baru guna menyumbangkan beragam pemikiran untuk melengkapi khazanah ilmu pemerintahan dan kebermanfaatan bagi banyak pihak dalam dunia akademik. Aamiin

Bandar Lampung, 10 Desember 2021
Penulis,

Ulfa Umayasari

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Air Bersih sebagai <i>Public Goods</i>	12
2.2 Aksesibilitas Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	15
2.3 Konsep <i>Water Governance</i> pada PDAM	19
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian	28
3.4 Jenis Data.....	29
3.5 Penentuan Informan.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	32
3.8 Teknik Analisis Data	33
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	34
IV. GAMBARAN UMUM	36
4.1 Kabupaten Pringsewu	36
4.1.1 Topografi.....	37
4.1.2 Kondisi Hidrologi	38
4.1.3 Kondisi Penduduk	38
4.2 Kelembagaan PDAM sebagai Sistem Ketersediaan Air Minum	39
4.2.1 Sejarah Singkat Pembentukan PDAM “Way Sekampung”	39
4.2.2 Visi dan Misi.....	40
4.2.3 Daerah Pelayanan.....	40
4.2.4 Sumber Air Baku dan Kapasitas Produksi.....	42

4.3 Kondisi SPAM PDAM Way Sekampung	42
4.4 Gambaran Tarif	47
4.5 Kepegawaian dan Struktur Organisasi	47
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung	51
5.1.1 Jumlah (volume) Air yang dikonsumsi oleh Masyarakat	53
5.1.2 Jangkauan (jarak) untuk Mendapatkan Air Bersih	59
5.1.3 Waktu yang Digunakan dalam Mendapatkan Air Bersih	61
5.1.4 Kualitas Air Bersih yang Digunakan	62
5.1.5 Harga yang dikeluarkan untuk Berlangganan Air PDAM	64
5.1.6 Kebijakan Pemerintah maupun PDAM tentang Air Bersih	66
5.2 Tata Kelola Air Bersih PDAM Way Sekampung	69
5.2.1 Pendekatan	70
5.2.1.1 Terbuka dan Transparan	70
5.2.1.2 Inklusif dan Komunikatif	73
5.2.1.3 Kebijakan dan Tindakan Koheren	74
5.2.1.4 Adil dan Etis	78
5.2.2 Pengoperasian	80
5.2.2.1 Akuntabel	80
5.2.2.2 Efisien	82
5.2.2.3 Responsif dan Berkelanjutan	83
5.3 Implikasi Temuan Penelitian terhadap Kebijakan Ketersediaan Air Bersih	86
5.4 Kelemahan Penelitian	88
VI. SIMPULAN DAN SARAN	91
6.1 Simpulan	91
6.1.1 Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung	91
6.1.2 Tata Kelola Air Bersih PDAM Way Sekampung	92
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Prediksi pada Tahun 2021 Kabupaten Pringsewu.....	3
2. Rencana Penjaminan Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih.....	4
3. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan	5
4. Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.....	39
5. Jumlah Pelanggan PDAM dan Jumlah Air Tersalurkan di Wilayah Kabupaten Pringsewu (Sebelum Pemekaran) Tahun 2008	41
6. Kinerja Unit Produksi IPA Bumi Arum	43
7. Pemakaian Rata-rata Air Domestik dan Non Domestik	54
8. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pringsewu	56
9. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kecamatan Pringsewu (2020-2025)	57
10. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kecamatan Gadingrejo (2020-2025)	58
11. Hasil Uji Laboratorium Air Baku Way Sekampung.....	64

12. Tarif Air Minum PDAM Way Sekampung	65
13. Kinerja PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 ..	71
14. Desa Program Pamsimas Kab.Pringsewu Tahun 2017.....	80
15. Kondisi Sumber Air Bersih PDAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2007	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	25
2. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu.....	37
3. Peta Daerah Pelayanan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu	41
4. Gambar Sungai Way Sekampung	42
5. Intake Bumi Arum	42
6. IPA Bumi Arum Kapasitas 3x25 liter/dt	43
7. Reservoir Bumi Arum 2 x 500 m ³	43
8. Skema Jaringan Unit Pringsewu	44
9. Kondisi Intake Banyumas saat ini	45
10. IPA Banyumas Kapasitas 5 liter/dt.....	46
11. Reservoir IPA Banyumas Kapasitas 40 m ³	46
12. Skema Sistem Jaringan Perpipaan IKK Banyumas	47

13. Struktur Organisasi PDAM Way Sekampung Kab. Pringsewu.....	48
14. Peta Wilayah Layanan PDAM “Way Sekampung” Tahun 2020	53
15. Wawancara Pelanggan PDAM Kecamatan Pringsewu	55
16. Pemanfaatan Air Minum Berdasarkan SPAM yang Ada	56
17. Wawancara Kabag Umum Keuangan PDAM Way Sekampung.....	58
18. Garis Ketinggian Reservoir Bumi Arum ke Pringsewu	60
19. Garis Ketinggian Reservoir Bumi Arum ke Gadingrejo	60
20. Skematik SPAM Pringsewu dan Gadingrejo.....	61
21. Wawancara Pelanggan PDAM Kecamatan Pringsewu	62
22. Peta dan Peran Wilayah di Kabupaten Pringsewu.....	68
23. Wawancara Plt. Direktur PDAM Way Sekampung.	72
24. Wawancara Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pringsewu	81
25. Wawancara Aktivist.....	81
26. Wawancara Fasilitator Pamsimas	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk berbagai kebutuhan, terutama air bersih untuk rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum. Air merupakan sumber daya utama kehidupan manusia. Apabila aset berharga ini berkurang bahkan habis, maka dapat dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Peningkatan kebutuhan air bersih mendorong manusia untuk berusaha menyediakan air bersih dengan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (Mochammad, 2018:37). Ketiga prinsip tersebut menjadi acuan bagi ketersediaan air secara kualitas yaitu air yang bersih, dan secara kuantitas debitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kontinuitas yaitu berkesinambungan dalam mencapai aksesibilitas yang mudah.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sampai pada tahun 2018, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 87,75% dari populasi, namun yang menikmati akses perpipaan baru sekitar 20,14%. Berangkat dari data tersebut peran PDAM sebagai BUMD penyedia layanan air bersih perpipaan patut menjadi perhatian pemerintah guna mengoptimalkan pelayanan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat. Sejauh ini akses air minum aman di Indonesia diperkirakan baru sekitar 6,8% rumah tangga (Purwanto, 2020:209). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi, sehingga kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Ketersediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya kebijakan dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan (Baas, 2020:10). Namun berkaca pada kondisi saat ini dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah namun ketersediaan air bersih masih terbatas, dalam hal ini keterlibatan banyak pihak sebagai penyedia air bersih perlu disoroti untuk mengoptimalkan peran dan kebutuhan masyarakat. Terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, dimana kebersihan sangat diutamakan terkhusus kebutuhan air bersih sebagai sarana cuci tangan dan membersihkan pakaian hingga barang pribadi guna terhindar dari virus ini. Pemakaian air untuk kebutuhan sehari-hari meningkat drastis di masa pandemi Covid-19. Penyebabnya, masyarakat paranoid dengan Covid-19 sehingga ketat menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan yang membutuhkan sarana air bersih.

Hasil studi *Indonesia Water Institute (IWI)* menyebutkan masyarakat mencuci tangan lima hingga sepuluh kali per-hari di masa pandemi. Persentase aktivitas mencuci tangan mencapai 58% hingga 82%. Hasil penelitian awal yang dilakukan pada Oktober-November 2020, menunjukkan ada peningkatan pola konsumsi air masyarakat di masa pandemi hingga tiga kali lipat. Kebutuhan air untuk mencuci tangan bertambah 50 liter per hari bagi keluarga dengan lima anggota keluarga, jika diasumsikan cuci tangan lebih dari lima kali dalam sehari. Aktivitas mandi juga meningkat di masa pandemi Covid-19. Satu orang bisa mandi tiga hingga enam kali dalam sehari¹. Jika mengacu pada kondisi pandemi saat ini dengan asumsi kebutuhan air meningkat, maka ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pringsewu yang cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas di tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2019, sehingga bisa diasumsikan

¹ Adnan, S.A.W (ed). 2021. “Penggunaan Air Meningkat Tiga Kali Lipat Selama Pandemi Covid-19”. Lampost.co. <https://m.lampost.co/berita-penggunaan-air-meningkat-tiga-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19.html>. Diakses 22 Februari 2021.

kebutuhan akan air bersih juga meningkat seiring dengan penambahan penduduk di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Prediksi pada Tahun 2021 Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Tahun 2019		Prediksi Tahun 2021	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /km ²	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /km ²
1.	Pardasuka	35.558	96,64	36.272	94,64
2.	Ambarawa	35.484	30,99	36.197	30,99
3.	Pagelaran	48.302	72,47	49.272	72,47
4.	Pagelaran Utara	16.024	100,28	16.346	100,28
5.	Pringsewu	84.868	53,29	86.574	53,29
6.	Gadingrejo	75.960	85,71	77.487	85,71
7.	Sukoharjo	49.804	72,95	50.805	72,95
8.	Banyumas	21.165	39,85	21.591	39,85
9.	Adiluwih	36.186	74,82	36.914	74,82
	TOTAL	403.350	625,0	411.458	625,0

Sumber : RISPAM Kabupaten Pringsewu 2015-2035

Sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin keenam mengenai “Air Bersih dan Sanitasi Layak” dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pringsewu yang menunjukkan ketersediaan air bersih belum mampu mencapai seratus persen. Namun secara paradoks, dalam satu aspek yaitu sanitasi Kabupaten Pringsewu meraih Anugerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) *Award* untuk peringkat ketiga kategori *Demand* di level nasional. Perolehan anugerah tersebut diumumkan pada acara Penganugerahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Rakornas STBM ke-4 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2020². Ini menjadi pertanyaan, sebab dalam tujuan poin ke-enam *SDGs* yaitu “air bersih dan sanitasi layak” mengalami perbedaan yang signifikan di Kabupaten Pringsewu yaitu ketersediaan air bersih belum maksimal namun sanitasi memperoleh peringkat tiga terbaik nasional.

² Adi Gunawan. 2020. “Pringsewu Toreh Anugerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat”. Monevonline.com. <https://monevonline.com/pringsewu-toreh-anugerah-sanitasi-total-berbasis-masyarakat/>. Diakses 22 Februari 2021.

Kabupaten Pringsewu telah menyusun Rencana Aksi Daerah guna percepatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* terhitung sejak tahun 2015 (*baseline*) hingga tahun 2019 sebagai tolak ukur pencapaian target Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan air bersih pada angka tahun 2019 baru mencapai 77,50% dari target 100%. Peran pemerintah guna memaksimalkan ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan mampu menjadi contoh bagi kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung yang menjamin serta memprioritaskan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berikut ini data terkait rencana penjaminan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang bersumber dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2015-2019.

Tabel 2. Rencana Penjaminan Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Target TPB	Indikator TPB	Sat- uan	Base	Target Pencapaian				Sum- ber Data
			- line (2015)	2016	2017	2018	2019	
Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%	%	75,34	75,34	76,15	76,75	77,50	PUPR
	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri pada 2019	%	75,34	75,34	75,68	-	-	PUPR

Sumber : Tujuan/Goal VI Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua (RAD Kabupaten Pringsewu)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2020, dari sebanyak 8 kecamatan diketahui baru ada dua kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang dapat mengakses air bersih melalui PDAM. PDAM sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bekerja dibidang pengadaan air bersih merupakan satu-satunya badan milik daerah yang tugas dan fungsinya salah satunya adalah pengadaan air bersih bagi masyarakat. Namun dari banyaknya yang dikelola oleh pihak PDAM sebagian besar adalah penyaluran air bersih kepada masyarakat. Masyarakat memerlukan air dan negara memfasilitasinya, dengan demikian maka terjadilah suatu hubungan antara masyarakat yang memerlukan air dengan PDAM utamanya sejalan dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2019 dan Matriks Rencana Aksi *SDGs* yang terfokus pada ketersediaan aksesibilitas air bersih di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 3. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m³)	Nilai (Rp)
Pardasuka			
Ambarawa			
Pagelaran			
Pagelaran Utara			
Pringsewu	2.091	396.363	1.529.139.400
Gadingrejo	402	50.983	203.827.100
Sukoharjo			
Banyumas			
Adiluwih			
Kabupaten Pringsewu	2.493	447.346	1.732.966.500

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

Terdapat beberapa fenomena keterbatasan air bersih di Kabupaten Pringsewu, Penulis mengambil contoh pada musim kemarau panjang membuat sumur-sumur di Desa Banjar Sari, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, mengalami kekeringan. Para warga pun terpaksa mandi tiga hari sekali.. Jika pun ada air, kondisinya keruh lantaran tercampur tanah karena terlalu tiris (sedikit). Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pringsewu mengungkapkan

kekeringan telah terjadi di sejumlah lokasi di Pringsewu. BPBD telah mendapat laporan dan permintaan dari warga yang membutuhkan air³.

Tidak hanya mengenai air yang sulit didapat ataupun keruh, terdapat penelitian di Kabupaten Pringsewu mengenai dampak atas sumber air yang tidak terlindungi yaitu mengenai hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita yang di rawat inap di RSUD Kabupaten Pringsewu. Peneliti berpendapat adanya hubungan antara penggunaan sumber air dengan kejadian diare pada balita. Diare merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor namun salah satu faktor yang paling sering ditemui pada balita adalah infeksi bakteri *e.coli* yang didapat melalui penggunaan sumber air yang tidak terlindungi (Yusnita, 2020:101). Sebab sumber air yang tidak terlindungi merupakan kumpulan bakteri dan sumber penyakit.

Tidak hanya itu, contoh lain berdasarkan hasil tinjauan tim Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Pringsewu, sejumlah desa di Kecamatan Banyumas sangat membutuhkan suplai air bersih. Ketersediaan air bersih di wilayah tersebut mulai berkurang akibat musim kemarau. Di Kecamatan Banyumas, kemarau panjang menyebabkan sumur dangkal warga mengalami kekeringan. Warga pun harus mengambil air dari sungai yang letaknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, kemarau juga berimplikasi pada menurunnya pendapatan petani karena kekeringan melanda lahan mereka. Bahkan, tidak sedikit tanaman padi yang mengalami kekeringan dan gagal panen⁴.

Salah satu program unggulan dalam rangka pemenuhan akses air minum yang digagas oleh pemerintah pusat adalah Program Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) yang sudah dimulai perencanaannya sejak Juli 2016 untuk Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan kegiatan Pamsimas III di

³ Jaya, T.P. 2019. "Kekeringan, Warga Pringsewu Lampung Mandi 3 Hari Sekali". Kompas.com. Farid Assifa (ed). <https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/15374191/kekeringan-warga-pringsewu-lampung-mandi-3-hari-sekali?page=all>. Diakses 4 Februari 2021.

⁴ ACT News. 2019. "ACT Lampung Distribusikan Air Bersih di Pringsewu". Aksi Cepat Tanggap Lampung. <https://news.act.id/berita/act-lampung-distribusikan-air-bersih-di-pringsewu>. Diakses 4 Februari 2021.

Kabupaten Pringsewu sudah berjalan 3 (tiga) tahun, pada tahun 2017, ada 15 (lima belas) desa yang mendapatkan kegiatan (12 desa APBN, 3 desa APBD). Sedangkan tahun 2018 sebanyak 21 (dua puluh satu) desa (16 desa APBN, 5 desa APBD). Dilanjutkan tahun 2019 mendapat 25 (dua puluh lima) desa bantuan (20 desa APBN, dan 5 desa APBD). Sementara untuk alokasi bantuan tahun 2020 hanya 'perkiraan' 8 desa saja yang terletak di kecamatan Pardasuka dan Ambarawa (masing-masing 4 desa). Tetapi sangat disayangkan perencanaan di tahun 2020 'hanya' untuk 8 desa yang terletak di dua kecamatan⁵.

Program Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target akses universal 100%. Program Pamsimas mulai tahun 2016 telah dikembangkan sebagai program untuk capaian target akses universal air minum dan sanitasi. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) mengungkapkan sarana air minum yang digunakan sebelum adanya Pamsimas adalah menggunakan sumur gali yang ada berkisar kedalaman 40 m dengan kadar kapur yang tinggi. Sehingga masyarakat membangun sistem satu titik untuk satu hingga lima rumah karena membutuhkan biaya yang besar, sedangkan tingkat ekonomi masyarakat masih tergolong rendah⁶.

Kondisi di atas dapat mengindikasikan lemahnya manajemen pengelolaan air di wilayah ini. Buruknya manajemen pengelolaan air berpengaruh terhadap masyarakat yang harus menanggung semua dampak yang timbul. Di musim kemarau, masyarakat mengalami kekeringan dan sulit memperoleh air bersih. Sementara itu, masyarakat juga dihadapkan dengan masalah banjir pada musim penghujan. Masalah ini dapat diantisipasi sejak dini jika pemerintah memiliki manajemen pengelolaan sumber daya air yang baik, dengan memperhatikan seluruh

⁵ Elkana. 2019. "Kondisi SPAMS Pringsewu Rangka Pencapaian Target Universal Akses Air Minum 2019". Sumatera Post. <https://sumaterapost.co/kondisi-spams-pringsewu-rangka-pencapaian-target-universal-akses-air-minum-2019/>. Diakses 4 Februari 2021.

⁶ Methariska. 2020. "Masyarakat Pekon Sukamulya Lampung Kini Mudah Mengakses Air Minum". Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya. Ari (ed). <https://ciptakarya.pu.go.id/v5/berita/detail/Ciptakarya/10591/Masyarakat-Pekon-Sukamulya-Lampung-Kini-Mudah-Mengakses-Air-Minum>. Diakses 4 Februari 2021.

aspek pengelolaan dari hulu hingga ke hilir (Alihar, 2018:73). Tidak hanya itu, fenomena ini mengindikasikan manajemen pelayanan publik PDAM dalam ketersediaan air bersih yang belum efektif dan efisien dan masih mengacu pada motif ekonomi. Melihat dari data BPS Kabupaten Pringsewu baru dua kecamatan yang terakses air perpipaan PDAM yaitu Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu yang kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah industri atau pusat perkotaan di Kabupaten Pringsewu. Padahal sejatinya air bersih merupakan barang publik (*public goods*) dan berhak dimiliki seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik aksesibilitas air bersih dan PDAM ini antara lain (Baas, 2020:9–16), penelitian ini menarik kesimpulan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyebutkan 3 (tiga) kategori besar dalam mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu *tractability of problem* (risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan) menunjukkan masih kurangnya komunikasi diantara para pelaksana kebijakan, kurangnya koordinasi dengan para pemangku kebijakan dan kurang jelasnya program dan konsistensi pelayanan ketersediaan air bersih kepada pelanggan atau masyarakat yang dilakukan oleh PDAM Tirta Sukapura. Kedua, *ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan keputusan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi) yang menunjukkan kurangnya sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan, diantaranya kurangnya anggaran pemeliharaan, dan biaya untuk pengembangan usaha dengan membangun sumber dan menambah jaringan PDAM. Selanjutnya poin ketiga, *non statutory variable affecting implementation* (variabel diluar kebijakan/peraturan perundangan yang mempengaruhi implementasi) menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Sukapura mendistribusikan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga peluang untuk lebih mengembangkan perusahaan sangat besar, tetapi hal tersebut terkendala oleh kurangnya anggaran.

Peneliti kedua (Aprilia dkk, 2020:1–13), meneliti kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Dampit dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, Peneliti menyimpulkan dengan teori dimensi kualitas pelayanan yang

dikembangkan oleh Zeithaml dkk. Bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan untuk mengukur kinerja PDAM Dampit, yaitu *tangible* (bukti fisik) sarana prasarana yang kurang, *reliability* (kehandalan) pegawai yang cukup baik, *responsiveness* (ketanggapan) juga dinilai cukup baik walau dalam mekanisme pembayaran membutuhkan waktu antrian yang lama, *assurance* (jaminan) juga dinilai cukup baik, namun pada aspek *empathy* (empati) PDAM dirasa masih kurang karena tidak berorientasi pada kenyamanan pelanggan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja PDAM masih belum maksimal tidak hanya di perkotaan melainkan juga di daerah.

Peneliti ketiga (Herdini dan Widiyarta, 2020:1–9), mengulas penelitiannya pada PDAM Kabupaten Nganjuk untuk melihat bagaimana responsivitas pelayanan publik dalam menangani keluhan pelanggan. Fokus penelitian ini berdasarkan pada ukuran responsivitas (Hardiansyah, 2018:63), yaitu: merespon setiap pelanggan, kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, kecermatan petugas, ketepatan waktu pelayanan, serta bagaimana petugas merespon semua pelanggan. Semua indikator tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dari segi sumber daya manusia masih memiliki kekurangan dalam hal jumlah dan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Namun dalam beberapa sikap memberikan penilaian yang cukup baik. Penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kinerja PDAM yang belum maksimal.

Peneliti keempat (Alihar, 2018:67–76), mengkaji akses pengelolaan air bersih di Kota Semarang yang dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama jika dikaitkan dengan masalah kependudukan. Masalah distribusi penduduk yang tidak merata telah mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk pada daerah tertentu yang melebihi daya dukung lingkungannya. Sebagai akibatnya, banyak penduduk yang harus bertempat tinggal di permukiman kumuh dan mereka memiliki keterbatasan sarana prasarana kebutuhan dasar, antara lain fasilitas air bersih. Seperti halnya jika dikaitkan dengan penelitian ini mengenai perbandingan dua kecamatan di Kabupaten Pringsewu yaitu Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo yang merupakan wilayah urban, memiliki penduduk lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya sehingga terakses PDAM.

Peneliti kelima (Rohmah, 2019:34–43), jurnal ini ditulis untuk mengetahui perbandingan praktik privatisasi sektor air yang ada di Inggris dan Indonesia melalui studi literatur. Kesimpulan pada jurnal ini menunjukkan bahwa privatisasi merupakan salah satu model tata kelola pelayanan publik yang sering diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan efisiensi anggaran. Sedangkan jika dikaitkan dengan penelitian ini, belum tersedia lembaga yang sejenis dengan yang diterapkan di Inggris sehingga mampu memaksimalkan kinerja BUMD dalam hal ini PDAM untuk bekerjasama dengan swasta hingga mampu memaksimalkan perannya.

Berdasarkan uraian pada penelitian-penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam memandang kinerja PDAM yang dinilai belum maksimal baik dari segi sumber daya maupun *output* kinerja serta adanya beberapa hambatan. Namun, perbedaan pada penelitian ini berangkat pada hak pemenuhan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat didukung kerangka target pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk memenuhi akses 100% air bersih bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang didasari pada teori aksesibilitas dan *water governance*. Oleh sebab itu berangkat dari beberapa penelitian di atas mampu menjadi acuan bahwa pemerintah di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat serta PDAM yang selama ini berperan sebagai subjek penyedia air bersih di bawah kendali pemerintah harus dioptimalkan perannya guna mencapai aksesibilitas ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa aksesibilitas terhadap air bersih produksi PDAM Way Sekampung hanya diperoleh masyarakat di dua kecamatan dari total sembilan kecamatan di Kabupaten Pringsewu?
- b. Bagaimana tata kelola PDAM Way Sekampung dalam ketersediaan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis aksesibilitas terhadap air bersih produksi PDAM Way Sekampung yang hanya diperoleh masyarakat di dua kecamatan dari total sembilan kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- b. Menganalisis tata kelola PDAM Way Sekampung dalam ketersediaan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini ialah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan mengenai pengembangan aksesibilitas *public goods* serta teori *water governance* atau tata kelola air yang melihat pengelolaan air bersih di suatu wilayah menggunakan analisis kondisi internal lembaga dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selaku pengguna air bersih dalam hal ini lembaga PDAM terkhusus mengenai aspek pengetahuan dalam manajemen pemerintah dan *stakeholder* terkait mengenai pengelolaan air bersih oleh BUMD.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu dijadikan referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu maupun daerah lain untuk mengevaluasi kebijakan serta kinerja lembaga penyedia air yaitu PDAM terutama sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu mengukur ketercapaian aksesibilitas air bersih bagi masyarakat baik di kota maupun desa. Terkhusus bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan biaya untuk memiliki sumber air bersih secara mandiri sehingga bergantung pada aksesibilitas air bersih yang disediakan oleh pemerintah terutama dalam hal ini PDAM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air Bersih sebagai *Public Goods*

Keterkaitan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih tidak terlepas dari pelayanan publik. Air bersih dikenal sebagai barang publik (*public goods*) adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis, namun pada praktiknya sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmati secara gratis. Setiap negara mempunyai perlakuan berbeda untuk mengelola barang publik dengan berbagai aturan, dengan tujuan utama untuk menjamin barang publik tersebut dari segi ketersediaan dan manfaat sesuai yang diharapkan. Namun masalah akan muncul ketika barang publik sudah diprivatisasi, alasannya perlu keikutsertaan swasta dalam pengelolaannya karena pemerintah mengalami kekurangan anggaran dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola barang publik. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat, barang ini harus dimiliki walaupun dengan harga yang mahal. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di perkotaan, untuk mendapatkan air bersih harus membeli dengan harga mahal, terkadang air yang disediakan oleh pemerintah berkualitas buruk (Andhika, 2017:42). Itulah sebabnya masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk sekadar memperoleh sumber air bersih.

Karakteristik barang publik *non-rival* dan *non-excludable*, ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan *non exclusive* berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh seperti jalan raya, museum, taman hutan, sarana pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih dan lain sebagainya. Banyaknya pengguna barang publik tersebut tidak akan

mengurangi manfaat dari barang publik itu sendiri. Manfaat yang dirasakan atas konsumsi suatu barang tidak akan berkurang walaupun dikonsumsi berulang-ulang. Jadi, barang publik belum tentu dikatakan barang publik, karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu. Semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan. Barang-barang tersebut dapat dipahami sangat sulit untuk menyediakannya, di sisi lain barang ini juga akan menghasilkan keuntungan, tapi di beberapa kondisi sulitnya ketersediaan barang publik disebabkan oleh mekanisme kegagalan pasar dan sangat berkontribusi terhadap kestabilan keadaan ekonomi dan sosial di suatu negara (Andhika, 2017:45). Contohnya seperti air bersih yang semestinya dapat kita peroleh dengan mudah.

Air bersih adalah salah satu sumber daya berbasis air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk kegiatan sanitasi, atau air yang memenuhi persyaratan untuk sistem ketersediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan kebutuhan air merupakan jumlah air yang diperlukan secara wajar untuk keperluan pokok manusia (domestik) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan air. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari”. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan kebutuhan air bersih. Mengacu kajian ini, proyeksi jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat kebutuhan air bersih pada masa mendatang. Perkiraan jumlah penduduk disuatu daerah dan pada tahun tertentu dapat dilakukan apabila diketahui tingkat pertumbuhan penduduknya (Abdi dan Utomo, 2019:540). Hal ini mengacu pada kalkulasi jumlah penduduk berdasar pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No.

492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum). Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu: Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV. Kelas I, air yang dapat digunakan untuk air bahan baku air minum dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas II, air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas III, air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas IV, air yang dapat digunakan untuk pertanian dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Mengacu pada klasifikasi air berdasarkan peruntukannya, maka tingkat kualitas air bersih yang digunakan untuk minum dan menjaga kebersihan diri masyarakat sangat diharapkan terutama di era pandemi seperti saat ini.

Menurut Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, akses terhadap air minum yang aman dan layak merupakan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat. Senada dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada target ke-enam, yaitu mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030 telah memasukkan akses terhadap air minum aman sebagai salah satu sasarannya. Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 juga menargetkan pencapaian akses air minum layak

menyeluruh di Indonesia dan peningkatan kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk menyediakan air layak pada masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a).

Klasifikasi air minum aman terdiri dari beberapa tingkatan pencapaian akses antara lain bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Menggunakan data Susenas Maret, penghitungan indikator air minum layak untuk memantau target TPB maupun RPJMN terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci dan lain-lain yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan. Perbedaan klasifikasi ini dengan yang sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat (Badan Pusat Statistik, 2020a:208–9).

2.2 Aksesibilitas Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih

Aksesibilitas berkaitan erat dengan tingkat kenyamanan atau kemudahan dalam mencapai lokasi yang ingin dicapai. Pernyataan mudah atau susah dalam mencapai tujuan sangat objektif, mudah untuk seseorang tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kinerja kualitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan. Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak, jika suatu tempat berdekatan dengan tempat yang lainnya, dinyatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu saling berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, penggunaan aksesibilitas yang tepat dapat dinyatakan dalam jarak dan waktu tempuh (Black, 1981:2). Sama halnya dalam ketersediaan air bersih yang aksesibilitasnya perlu terukur.

Aksesibilitas berasal dari kata 'akses' yang merupakan terjemahan dari kata *access* dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata *accessibility* yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau atau dicapai (Echols dan Shadily, 2006:5). Jika membaca pembahasan tentang akses terhadap pelayanan kesehatan, (Taylor dkk, 1975:39) menegaskan bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. Mengenai aspek pelayanan publik, (Aday, 1993:729) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumber daya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan. Berdasarkan kata lain akses terkait dengan beberapa konsep antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
- b. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya akan memicu akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai *supplier* (penyedia) dengan yang membutuhkan (*demand*) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
- c. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan yang setara akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.

Pelayanan publik dalam berbagai sektor yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Oleh karena itu, akses kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat dalam masyarakat (Effendi, 1986).

Aksesibilitas merupakan konsep dasar dari interaksi atau hubungan tata guna lahan dan transportasi. Pengertian lain tentang aksesibilitas atau tingkat daya jangkau adalah kemudahan penduduk untuk menjembatani jarak antara berbagai pusat kegiatan. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut (Jayadinata, 1992:3). Konteks yang paling luas mengartikan aksesibilitas sebagai kemudahan melakukan pergerakan di antara dua tempat dan akan meningkat dari sisi waktu atau uang ketika biaya pergerakan menurun. Kebutuhan air sangat bervariasi, hal yang mempengaruhi kebutuhan air bersih tergantung pada: jumlah penduduk, perkembangan kota (permukiman), perkembangan industri dan kondisi ekonomi. Pemakaian air per kapita bervariasi tergantung kepada beberapa faktor, yaitu tingkat kehidupan dan tingkat perekonomian masyarakat tersebut, serta tingkat pendidikan masyarakat dan keadaan sistem ketersediaan air (Hakim, 2010:57). Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki variasi kebutuhan air bersih yang berbeda.

Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai derajat hubungan antar satu tempat ke tempat lain yang dapat diukur dengan jumlah, biaya, jarak dan waktu. Tempat yang dapat dicapai dengan jarak yang pendek, waktu yang cepat, biaya yang rendah dan jumlah yang sesuai keinginan untuk mendapatkan air bersih menggambarkan adanya aksesibilitas yang tinggi. Apabila pemakai (konsumen) sulit untuk mendapatkan air bersih karena jarak yang jauh, waktu yang lama, biaya yang tinggi dan mendapatkan jumlah tidak sesuai yang diharapkan menggambarkan adanya aksesibilitas yang rendah (Hakim, 2010:50–51).

Untuk pelayanan air bersih yang optimal, yang berarti tingkat akses tinggi dimana air yang digunakan masyarakat harus langsung dialirkan kedalam rumah. Sebab semakin jauh masyarakat mengakses air bersih berarti semakin buruk akses air bersih bagi masyarakat tersebut (Howard dan Bartram, 2003:1–28). Masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses air bersih, adalah:

- a. Permukiman yang belum terjangkau pelayanan air bersih.
- b. Jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih mengakibatkan butuh waktu lebih

banyak.

c. Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang rendah (Santoso, 2006:30).

Sudah menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan prasarana air bersih untuk masyarakat. Hal ini sangat menentukan sekali dalam mudah dan tidaknya masyarakat mendapatkan air bersih. Adanya prioritas pembangunan dalam prasarana air bersih, masyarakat akan lebih mudah mendapatkannya. Program pembangunan sektor air bersih saat ini adalah meningkatkan pembangunan ketersediaan prasarana air bersih, meningkatkan keandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana air bersih. Berdasarkan uraian di atas maka, indikator konsep aksesibilitas air bersih yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu:

- a. Jumlah (volume) air yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Jangkauan (jarak) untuk mendapatkan air bersih.
- c. Waktu yang digunakan dalam mendapatkan air bersih.
- d. Kualitas air bersih yang digunakan.
- e. Harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih.
- f. Kebijakan pemerintah maupun PDAM tentang air bersih.

Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai derajat hubungan antar satu tempat ke tempat lain yang dapat diukur dengan jumlah, biaya, jarak dan waktu. Tempat yang dapat dicapai dengan jarak yang pendek, waktu yang cepat, biaya yang rendah dan jumlah yang sesuai keinginan untuk mendapatkan air bersih menggambarkan adanya aksesibilitas yang tinggi. Apabila pemakai (konsumen) sulit untuk mendapatkan air bersih karena jarak yang jauh, waktu yang lama, biaya yang tinggi dan mendapatkan jumlah tidak sesuai yang diharapkan menggambarkan adanya aksesibilitas yang rendah (Hakim, 2010:51)

Variabel-variabel inilah yang digunakan sebagai variabel dasar aksesibilitas, yang kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat di permukiman Kabupaten Pringsewu yang diketahui saat ini mendapat kategori dengan kondisi PDAM yang sakit atau “buruk” menurut data yang dirilis Dirjen Cipta Karya

Kementerian PUPR pada tahun 2020⁷. Maka perlu adanya upaya ketersediaan air bersih yang sesuai dengan standar air bersih PDAM (Hakim, 2010:53–54). Sebab PDAM sebagai lembaga Sistem Ketersediaan Air Minum perlu memperhatikan standar air bersih yang didistribusi.

Berdasarkan pada penjelasan konsep sebelumnya, terdapat korelasi antara aksesibilitas masyarakat dengan ketersediaan air bersih. Aksesibilitas masyarakat merupakan kunci penting bagaimana PDAM mampu dikategorikan memberikan pelayanan publik yang prima terutama dalam sektor pemenuhan barang publik seperti air bersih yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat harus dalam kondisi bersih dan layak dikonsumsi. Aksesibilitas masyarakat secara utuh dan merata mampu menjadi indikator bagaimana koordinasi antara pemangku kepentingan yang terkait dalam ketersediaan sektor air bersih ini terutama melihat kerjasama Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu serta PDAM Way Sekampung dalam menyinergikan ketersediaan air bersih agar dapat diproduksi dan terdistribusi dengan maksimal. Jika semakin baik tata kelola dalam ketersediaan air bersih oleh PDAM Way Sekampung, maka akan semakin baik aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu.

2.3 Konsep *Water Governance* pada PDAM

Dewasa ini penelitian tentang pengelolaan air bersih mulai beralih ke konsep *water governance*. Meskipun demikian, penggunaan konsep *water governance* dalam banyak penelitian bersifat sangat situasional. Masalah *water governance* yang paling strategis berada di negara berkembang dan sering menderita masalah hidrologi yang buruk yakni sering mengalami banjir, kekeringan, tingginya angka ketidakpastian sumber air, ketergantungan pada pertanian, irigasi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga kebutuhan air juga meningkat. Kecilnya prioritas infrastruktur untuk pengelolaan air, kelembagaan publik pengelola sumber daya air yang rapuh dan menghadapi lebih banyak ketidakpastian

⁷ Radar.com. 2020. “Duh, PDAM Way Sekampung Pringsewu Ternyata Kondisinya ‘Masih Sakit’”.<https://radarcom.id/2020/01/06/duh-pdam-way-sekampung-pringsewu-ternyata-kondisinya-masih-sakit/>. Diakses 1 Maret 2021.

yang timbul dari perubahan iklim. Hasilnya, lebih banyak ketidakamanan sumber daya air terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang.

Pentingnya keberadaan air yang berpengaruh pada segala aspek dalam kehidupan manusia, membuat pengelolaan air menjadi isu global yang akan terus diperbincangkan. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola dengan prinsip lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dengan praktik pengambilan kebijakan yang berlandaskan kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi (Kusumah dan Mustofa, 2020:33-34).

Istilah *water governance* atau “tata kelola air” perlu didefinisikan dengan hati-hati. Penting juga untuk mengidentifikasi indikator yang membuat tata kelola air “efektif”. *Global Water Partnership* mendefinisikan tata kelola air sebagai tata kelola air yang mengacu pada berbagai sistem politik, sosial, ekonomi dan administrasi yang ada untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air, dan pemberian layanan air, di berbagai tingkat masyarakat. Mencakup kemampuan untuk merancang kebijakan publik dan kerangka kelembagaan yang diterima secara sosial dan memobilisasi sumber daya sosial untuk mendukungnya.

Kebijakan air dan proses perumusannya harus memiliki tujuan untuk pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan, dan agar implementasinya efektif, para pelaku atau pemangku kepentingan utama harus dilibatkan dalam proses tersebut. Aspek tata kelola cenderung bersifat tumpang tindih dengan aspek teknis dan ekonomi air, tetapi pemerintah mengarahkan kita pada elemen politik dan administratif untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang.

Tata kelola air adalah bagian dari masalah yang lebih umum dari penciptaan infrastruktur fisik dan kelembagaan suatu negara dan dari masalah kerjasama sosial yang lebih umum. Tata kelola air berkaitan dengan organisasi dan lembaga politik, sosial dan ekonomi yang penting untuk pengembangan dan pengelolaan air. Mengingat kompleksitas penggunaan air dalam masyarakat, mengembangkan,

mengalokasikan dan mengelolanya secara adil dan efisien serta memastikan kelestarian lingkungan mensyaratkan bahwa suara yang berbeda patut didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan atas akses air dan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas (Rogers dan Hall, 2003:16).

Ada persepsi yang berkembang bahwa tata kelola sumber daya air dan layanan air berfungsi lebih efektif dengan struktur sosial terbuka yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil, perusahaan swasta dan media, semua jaringan untuk mendukung dan mempengaruhi pemerintah. Selain itu, memeriksa peran jaringan atau tata kelola terdistribusi membantu mengatasi perdebatan steril tentang penyampaian layanan air swasta versus publik dan peran masyarakat. Tujuan dari terciptanya sistem pemerintahan yang tepat memberikan fokus yang lebih praktis. Peran masyarakat sipil dan LSM dalam pengelolaan air dan pelayanan juga menjadi lebih jelas karena peraturan pemerintah memfasilitasi pemerintahan sendiri.

Penting dalam merancang sistem tata kelola yang efektif, biaya transaksi tidak dinaikkan secara berlebihan dan tindakan tidak dibatasi. Selalu ada *trade-off* dan penting untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat untuk setiap situasi daripada mencari sistem yang ideal. Di masa depan, sistem tata kelola seringkali sulit dan dapat menghambat pembangunan, tetapi sifat keterbukaan masyarakat menuntut tingkat tata kelola ini. Di negara-negara miskin, sistem pemerintahan tidak boleh memaksakan terlalu banyak pembatasan pada tindakan, jika tidak pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin akan terhambat. Terlalu sering tuntutan yang bermaksud baik untuk memperbaiki tata kelola dapat menjadi rem bagi pembangunan. Biaya transaksi ekonomi dan sosial dari tata kelola dapat menjadi besar dan harus berhati-hati untuk memastikan bahwa semua itu rasional (Rogers dan Hall, 2003:26-27). Tidak ada model tunggal tata kelola air yang efektif; memang untuk menjadi sistem pemerintahan yang efektif harus sesuai dengan kekhususan sosial, ekonomi dan budaya masing-masing negara. Namun demikian, ada beberapa prinsip atau indikator dasar yang dianggap penting untuk tata kelola air yang efektif yang terbagi dua dari aspek yaitu pendekatan dan pengoperasian (Rogers dan Hall, 2003: 27-29).

a. Pendekatan

1. Terbuka dan Transparan

Lembaga penyedia air bersih harus bekerja secara terbuka. PDAM dalam hal ini harus dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga. Selain terbuka, tata kelola yang baik mensyaratkan semua keputusan kebijakan transparan baik perihal pembayaran fasilitas air bersih sehingga baik pihak dalam maupun luar dapat dengan mudah mengikuti langkah-langkah yang diambil dalam perumusan kebijakan. Ini sangat penting terkait dengan transaksi keuangan.

2. Inklusif dan Komunikatif

Kualitas, relevansi, dan efektivitas kebijakan pemerintah bergantung pada kepastian partisipasi yang luas di seluruh rantai kebijakan dari konsepsi hingga implementasi. Partisipasi yang lebih baik kemungkinan besar akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar pada hasil akhir dan pada lembaga yang mengeluarkan kebijakan. Partisipasi sangat bergantung pada semua tingkat pemerintahan mengikuti pendekatan inklusif ketika mengembangkan dan melaksanakan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dibangun di atas arus informasi yang bebas. Lembaga dan sistem tata kelola perlu berkomunikasi di antara para pelaku dan pemangku kepentingan dengan cara langsung. Jika dilakukan dengan benar, hal ini akan membuat masyarakat dan pemerintahan saling berinteraksi.

3. Kebijakan dan Tindakan Koheren

Kebutuhan akan harmoni dan koherensi dalam tata kelola air semakin meningkat seiring dengan bertambahnya rentang tugas dan menjadi lebih beragam. Tantangan seperti perubahan iklim dan demografis melintasi batas-batas kebijakan sektoral di mana pemerintah telah dibangun. Koherensi membutuhkan kepemimpinan politik dan tanggung jawab yang kuat di pihak lembaga di berbagai tingkat untuk memastikan pendekatan yang konsisten dalam sistem yang kompleks. Tata kelola air harus meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT). Institusi tersebut harus mempertimbangkan semua penggunaan dan pengguna dalam sektor air

tradisional dan juga keterkaitannya dengan dan dampaknya terhadap semua pengguna dan sektor potensial lainnya.

4. Adil dan Etis

Semua kalangan harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Terutama dalam pemenuhan air bersih. Pemerataan antara dan di antara berbagai kelompok kepentingan, pemangku kepentingan, dan pemilih konsumen perlu dipantau secara cermat selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Tata kelola air harus sangat didasarkan pada prinsip-prinsip etis masyarakat di mana air berfungsi dan berdasarkan aturan hukum. Hal ini terwujud paling kuat dalam masalah keadilan, hak kepemilikan atas penggunaan, akses, dan kepemilikan air. Kerangka hukum dan peraturan harus adil dan ditegakkan.

b. Pengoperasian

1. Akuntabel

Peran dalam proses legislatif dan eksekutif harus jelas. Setiap lembaga harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Namun ada juga kebutuhan akan kejelasan dan tanggung jawab yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di tingkat mana pun. “aturan main” perlu dijelaskan dengan jelas, seperti halnya konsekuensi dari pelanggaran aturan, dan memiliki mekanisme penegakan arbitrase yang dibangun untuk memastikan bahwa penyelesaian yang memuaskan masih dapat dicapai ketika konflik yang tampaknya tidak dapat didamaikan muncul di antara para pemangku kepentingan. Pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta kepada pemangku kepentingan kelembagaan. Akuntabilitas ini berbeda-beda tergantung pada organisasi dan apakah keputusan itu internal atau eksternal organisasi.

2. Efisien

Teori ekonomi klasik menuntut efisiensi dalam hal efisiensi ekonomi, tetapi ada juga konsep efisiensi politik, sosial, dan lingkungan yang perlu diperhatikan dan diimbangi dengan efisiensi ekonomi sederhana. Penting memahami bahwa sistem tata kelola tidak menghalangi tindakan, misalnya

meminimalkan biaya transaksi akan sangat membantu efisiensi politik dan ekonomi terutama mengenai tarif PDAM.

3. Responsif dan Berkelanjutan

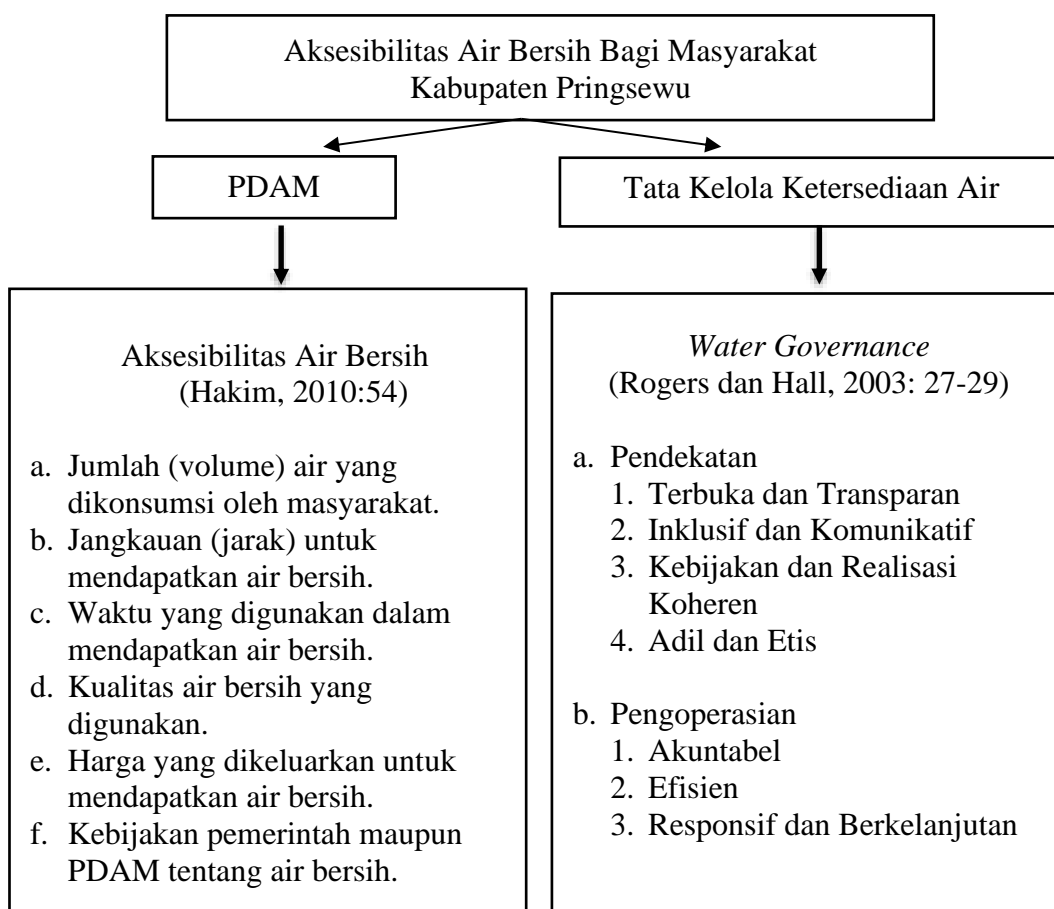
Kebijakan itu harus memberikan apa yang dibutuhkan atas dasar permintaan tujuan yang jelas, dan evaluasi dampak masa depan. Ketanggaan juga membutuhkan kebijakan untuk diterapkan secara proporsional dan keputusan diambil pada tingkat yang paling tepat. Kebijakan tersebut harus berbasis insentif. Ini akan memastikan bahwa ada keuntungan sosial atau ekonomi yang jelas yang akan dicapai dengan mengikuti kebijakan. Lembaga juga harus dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Tata kelola air harus melayani masa depan serta pengguna layanan air saat ini.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Mengacu pada kondisi empiris di Kabupaten Pringsewu bahwa kinerja PDAM dinilai masih “buruk” atau dalam artian memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan sehingga belum mampu memberikan aksesibilitas ketersediaan air bersih secara maksimal di beberapa kecamatan yang terletak di Kabupaten Pringsewu, dan hanya menjangkau dua kecamatan yaitu Pringsewu dan Gadingrejo. Tidak hanya itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh apa jangkauan aksesibilitas air bersih yang tersedia di Kabupaten Pringsewu serta upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran PDAM sebagai instrumen penyedia air bersih yang berkedudukan sebagai BUMD.

Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini dianalisis menggunakan dua teori yaitu teori aksesibilitas dan teori *water governance* (tata kelola air). Menggunakan teori aksesibilitas (Hakim, 2010:54) guna mengukur indikator keterjangkauan aksesibilitas air bersih yang dipertanyakan mengapa baru menjangkau dua kecamatan dari total keseluruhan delapan kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Aksesibilitas mampu mengukur mengapa ada pihak yang tidak terpenuhi akses kebutuhannya terutama dalam hak atas air bersih di Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan pertanyaan penelitian kedua mengenai upaya ketersediaan air bersih oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dapat diukur menggunakan teori *water governance* (Rogers dan Hall, 2003:27-29) atau dikenal tata kelola air untuk memperoleh jawaban terkait kinerja PDAM dan upaya pengoptimalan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas dalam menyediakan dan mengelola air bersih untuk memaksimalkan tugas dan perannya guna mencapai aksesibilitas ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teori tata kelola air ini didasari atas dua aspek yaitu berdasar pada pendekatan dan performa atau pengoperasian yang dijalankan PDAM. Oleh sebab itu, dapat Peneliti gambarkan kerangka pikir penelitian yang dijadikan sebagai panduan guna memperjelas kerangka penelitian dan sebagai alur berpikir Penulis dalam menjalankan penelitian di lapangan dengan topik “Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu” ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Berbicara mengenai pemilihan metode, penelitian “Aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih” ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menepis asumsi beberapa pihak, terutama Peneliti pemula yang sering melakukan kesalahan dengan memilih metode terlebih dulu sebelum merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Metode dapat dipahami sebagai cara yang dipilih Peneliti dalam proses penelitiannya, seperti metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis, metode sintesis pengujian atas data, dan lainnya. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa metode tidak boleh dijadikan dasar untuk menentukan metodologi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tujuan, struktur, proses, dan jenis penelitian (Manzilati, 2017:7–8).

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian pada topik “Aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu” ini lebih menekankan pada pengungkapan fakta di lapangan secara deskriptif mengenai pemenuhan hak masyarakat atas aksesibilitas air bersih di Kabupaten Pringsewu serta mengkaji upaya PDAM mengoptimalkan perannya dalam ketersediaan aksesibilitas air bersih guna mencapai ketersediaan seratus persen air bersih. Maka penelitian dengan metode kualitatif dianggap Peneliti mampu menjadi pisau analisis dalam mengemukakan hasil penelitian ini. Sebab ada penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan penelitian “Aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih” ini mampu dijelaskan secara kualitatif dengan argumentasi yang menjelaskan cakupan aksesibilitas

masyarakat serta peranan beberapa organisasi lembaga penyedia air bersih yaitu PDAM sebagai subjek dan Dinas PUPR sebagai pemerintah daerah yang berperan dalam pemenuhan air bersih. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh (Jaya, 2020:6), seperti halnya dalam penelitian ketersediaan air bersih.

Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Anggito dan Setiawan, 2018:14). Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Di sinilah partisipan menganggap dirinya penting, karena informasinya sangat bermanfaat. Metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifkasian oleh Peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia (Raco, 2010:8). Penelitian aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih berangkat dari keresahan Peneliti atas keterbatasan aksesibilitas air bersih yang difasilitasi PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu. Keterlibatan Peneliti mendukung penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang di dalamnya Peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan (Creswell, 2019:251). Ini terlihat juga dengan kedudukan Peneliti sebagai pelanggan PDAM di Kabupaten Pringsewu.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada definisi konseptual dan definisi operasional teori yang digunakan Peneliti untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Berangkat dari dua pertanyaan penelitian yaitu mengenai aksesibilitas dan upaya ketersediaan air bersih yang optimal, maka Peneliti bermodalkan konsep Aksesibilitas (Hakim, 2010:54) dan konsep *Water Governance* (Rogers dan Hall, 2003: 27-29). Fokus penelitian terletak pada peran

PDAM dan pihak terkait seperti Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu serta Pamsimas yang berwenang menyediakan akses air bersih di Kabupaten Pringsewu. Sebab sejatinya jika sanitasi Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori baik maka ini perlu diiringi dengan kondisi akses air bersih yang layak dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penelitian ini akan diuraikan dalam hasil dan pembahasan sesuai dengan indikator yang ditetapkan sehingga dapat Peneliti ambil kesimpulan dan rekomendasi. Dimulai dari Teori *Water Governance* (Rogers dan Hall, 2003: 27-29) yang terdiri dari variabel :

- a. Pendekatan: Mendeskripsikan tata kelola yang sudah berjalan selama ini dalam ketersediaan akses air bersih masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
 1. Terbuka dan Transparan
 2. Inklusif dan Komunikatif
 3. Kebijakan dan Realisasi Koheren
 4. Adil dan Etis
- b. Pengoperasian: Menguraikan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM.
 1. Akuntabel
 2. Efisien
 3. Responsif dan Berkelanjutan

Selain itu indikator penelitian ini mencakup akses air bersih yang disalurkan PDAM kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah (volume) air yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Jangkauan (jarak) untuk mendapatkan air bersih.
- c. Waktu yang digunakan dalam mendapatkan air bersih.
- d. Kualitas air bersih yang digunakan.
- e. Harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih.
- f. Kebijakan pemerintah maupun PDAM tentang air bersih.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan serta merupakan pihak yang terlibat langsung dalam ketersediaan akses air bersih di

Kabupaten Pringsewu. Adapun informan yang ditemui dalam penelitian ini meliputi :

- a. Araina Dwi Rustiani, S.T.,M.T. selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu; sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penataan ruang di Kabupaten Pringsewu serta memahami regulasi yang ditetapkan dalam ketersediaan akses air bersih.
- b. Rini Andalusia, S.T. selaku Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Sekampung Kabupaten Pringsewu; sebagai pihak di bawah kendali Dinas PUPR yang berperan mengelola (produksi, operasional, distribusi) ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu.
- c. Putrawansyah, S.E. selaku Kepala Bagian Umum Keuangan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu sebagai pihak yang melengkapi informasi tambahan dari Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu.
- d. Almaidah selaku Fasilitator Pamsimas Kabupaten Pringsewu; sebagai pihak yang memahami kondisi di lapangan terkait data perluasan akses bagi daerah yang tidak terjangkau oleh PDAM.
- e. Edy Karizal selaku aktivis sebagai pihak yang pernah terlibat dalam tim balai konservasi mampu memberikan pandangan di luar sudut pandang pemerintah menanggapi isu ketersediaan air bersih.
- f. Dayat selaku Teknisi Pengelola PDAM Way Sekampung di Bumi Arum.
- g. Surifah selaku Pelanggan Air PDAM di Kecamatan Gadingrejo.
- h. Setiyo Winarto selaku Pelanggan Air PDAM di Kecamatan Pringsewu

3.4 Jenis Data

Jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Mampu memahami dan mengidentifikasi latar data dan sumber data, merupakan memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna memudahkan melakukan pengumpulan data (Silalahi, 2012:289). Pada penelitian kali ini, Peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara informan baik yang bersifat terstruktur maupun secara mendalam kepada informan. Informan Peneliti terdiri dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam ketersediaan akses air bersih di Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan data sekunder Peneliti mengacu pada data sejarah berdirinya PDAM di Kabupaten Pringsewu, Profil PDAM Kabupaten Pringsewu, Peta jaringan perpipaan atau Sambungan Rumah (SR) yang terpasang, Rincian besaran tarif pembayaran air PDAM, RISPAM Kabupaten Pringsewu 2020-2025, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan, data atau dokumen dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 sebagai acuan rekapitulasi data yang telah terekam, laporan kinerja PDAM dan Pamsimas Kabupaten Pringsewu serta arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan pelayanan akses air bersih di Kabupaten Pringsewu.

3.5 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dan *snowballing sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya informan dianggap paling tahu tentang data yang Peneliti harapkan atau memiliki pengetahuan atas objek masalah atau berkecimpung dalam instansi yang Peneliti kaji sehingga memudahkan Peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. *Snowballing sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang mulanya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar (seperti bola salju yang menggelinding) hingga jawaban penelitian dapat terjawab (Sugiyono, 2020:454).

Purposive sampling digunakan untuk memilih informan seperti Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu, aktivis serta *District Coordinator* Pamsimas Kabupaten Pringsewu serta pihak lain yang dianggap berkompeten di bidangnya dan mengetahui persoalan. Sementara *snowballing sampling* digunakan bagi sampel kategori masyarakat yang berlangganan PDAM di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo. Teknik ini dipilih guna memperoleh jawaban penelitian secara mendalam hingga jawaban atau data yang didapat bersifat jenuh.

Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian Peneliti tetap menyebutkan kategori informan yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2020:455).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2016:187). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; pertama, wawancara terbuka yaitu mendapatkan data mengenai pengelolaan PDAM dalam memenuhi aksesibilitas masyarakat untuk ketersediaan air bersih dengan mewawancarai informan dan mengajukan beberapa daftar pertanyaan terbuka maupun secara mendalam yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat dalam ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu guna mendapatkan jawaban secara utuh sesuai pemahaman informan di lapangan. Berikut rincian informan yang telah ditemui oleh Peneliti:

- a. Araina Dwi Rustiani, S.T.,M.T. selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu pukul 14.30-15.30 WIB (\pm 1 jam).
- b. Rini Andalusia, S.T. selaku Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Sekampung Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 April 2021 bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu pukul 10.30-12.00 WIB (\pm 1 jam 30 menit).
- c. Putrawansyah, S.E. selaku Kepala Bagian Umum Keuangan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu pada tanggal 29 April 2021 bertempat di Kantor PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu pukul 09.30-10.30 WIB (\pm 1 jam).
- d. Almaidah selaku Fasilitator Pamsimas Kabupaten Pringsewu pada tanggal 7 Mei 2021 bertempat di kediaman Almaidah di Kecamatan Pagelaran pukul 12.30-13.30 WIB (\pm 1 jam).
- e. Edy Karizal selaku aktivis pada tanggal 30 April 2021 bertempat di kediaman Edy Karizal di Kota Bandar Lampung pukul 14.00-15.00 WIB (\pm 1 jam).

- f. Dayat selaku Teknisi Pengelola PDAM Way Sekampung pada tanggal 1 Mei 2021 bertempat di Bendungan Bumi Arum Pringsewu pukul 10.00-11.00 WIB (\pm 1 jam).
- g. Surifah selaku masyarakat pelanggan PDAM di Kecamatan Gadingrejo pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di kediaman Surifah di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo pukul 19.30-20.30 WIB (\pm 1 jam).
- h. Setiyo Winarto selaku masyarakat pelanggan PDAM di Kecamatan Pringsewu pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di kediaman Setiyo Winarto di Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu pukul 09.00-10.00 WIB (\pm 1 jam).

Ada anggapan yang perlu dipegang oleh Peneliti dalam menggunakan metode wawancara (*interview*) (Sugiyono, 2016:188) diantaranya:

- a. Bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan Peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Peneliti (Sugiyono, 2016:188).

Kedua dokumentasi, digunakan untuk mendukung teknik pengumpulan data di atas. Peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan tulisan atau arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Rencana Induk Sistem Ketersediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2040, laporan PDAM seperti data pelanggan yang sudah terakses air perpipaan PDAM, data jumlah debit air dan perpipaan yang sudah menjangkau rumah warga, serta disinkronkan dengan data yang didapat dari Tim Pamsimas berupa data jumlah KK yang tidak terakses PDAM.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga Peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Silalahi, 2012:342):

- a. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data baik transkrip

wawancara dengan informan dan dokumentasi dari Dinas PUPR, PDAM, Tim Pamsimas serta masyarakat yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Proses selanjutnya adalah Peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

b. Interpretasi Data

Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data baik transkrip wawancara dengan ditelaah simpulannya serta menemukan data penting dari arsip dan dokumentasi yang didapatkan dari Dinas PUPR, PDAM, Pamsimas, dan masyarakat pelanggan PDAM.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara informan serta data dokumen. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016:332).

a. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan mengumpulkan hasil catatan Dinas PUPR, PDAM dan Tim Pamsimas, Aktivistis dan Masyarakat dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah didapat melalui reduksi untuk menggambarkan kondisi aksesibilitas air bersih di Kabupaten Pringsewu.

c. Verifikasi Data

Data wawancara dengan informan dari Dinas PUPR, PDAM, Tim Pamsimas, Aktivistis dan Masyarakat diuji keabsahannya dengan objektivitas dicocokkan dengan data yang didapat dari instansi terkait. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penulisan sesuai data yang telah mengalami proses *display* data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Setelah semua data hasil analisis penelitian dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menguji kredibilitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian yang valid adalah apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sementara hasil penelitian yang *reliable* adalah apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif istilah keabsahan data meliputi uji kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability* (Sugiyono, 2020:520).

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*).

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, triangulasi, diskusi dan analisis kasus negatif. Peneliti melakukan triangulasi untuk meninjau kebenaran data tertentu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan pengecekan data kualitatif melalui 3 teknik yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara triangulasi sumber penelitian ini menggunakan lima sumber data yaitu masyarakat pelanggan PDAM, Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, pihak PDAM, Pamsimas dan aktivis.

b. Uji Keteralihan (*Transferability*).

Pada penyusunan tesis ini, Peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini dilakukan melalui proses permintaan arahan dalam bimbingan kepada Dosen Pembimbing guna mengetahui apakah penelitian yang disusun dapat memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian ini agar laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

c. Uji Kebergantungan (*Dependability*).

Pada penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya tersedia, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Pada penelitian ini, proses wawancara telah direkam dan

didokumentasikan, proses observasi terkait peristiwa sudah dicatat dan didokumentasikan serta proses studi dokumen dilakukan dan meminta salinan terhadap dokumen terkait agar terdapat jejak aktivitas penelitian yang jelas.

d. Uji Kepastian (*Confirmability*).

Uji *Confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan hasil wawancara dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya yaitu terkhusus data antara Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu dengan pihak PDAM serta informasi yang diperoleh dari masyarakat selaku pengguna layanan PDAM. Data dari informan telah di kompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi terkait peristiwa pemeriksaan laporan.

Berangkat pada berbagai jenis triangulasi, maka pada penelitian “Aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu” ini menggunakan triangulasi teknik berupa hasil wawancara dengan informan dilengkapi dokumentasi yang didapatkan di lapangan seperti kecocokan data jumlah pelanggan PDAM, jumlah debit air yang tersalurkan, jaminan kualitas air yang didistribusikan serta fasilitas sambungan rumah yang terpasang, aksesibilitas yang didapatkan sesuai atau tidak dan di sandingkan dengan triangulasi sumber yang digunakan Peneliti di lapangan sebagai panduan penelitian yang diajukan serta mampu memberikan kesimpulan yang berdasar pada bukti dan fakta di lapangan serta mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga terkait, aktivis dan dedikasi pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai aksesibilitas ketersediaan air bersih bagi masyarakat sebagai *public goods*.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk Tanggamus yang terjadi pada tahun 2008 dan dipertegas dengan keluarnya Undang-undang No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Pada saat Kabupaten Pringsewu masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kecamatan yang kegiatan ekonominya berkembang dengan sangat pesat.

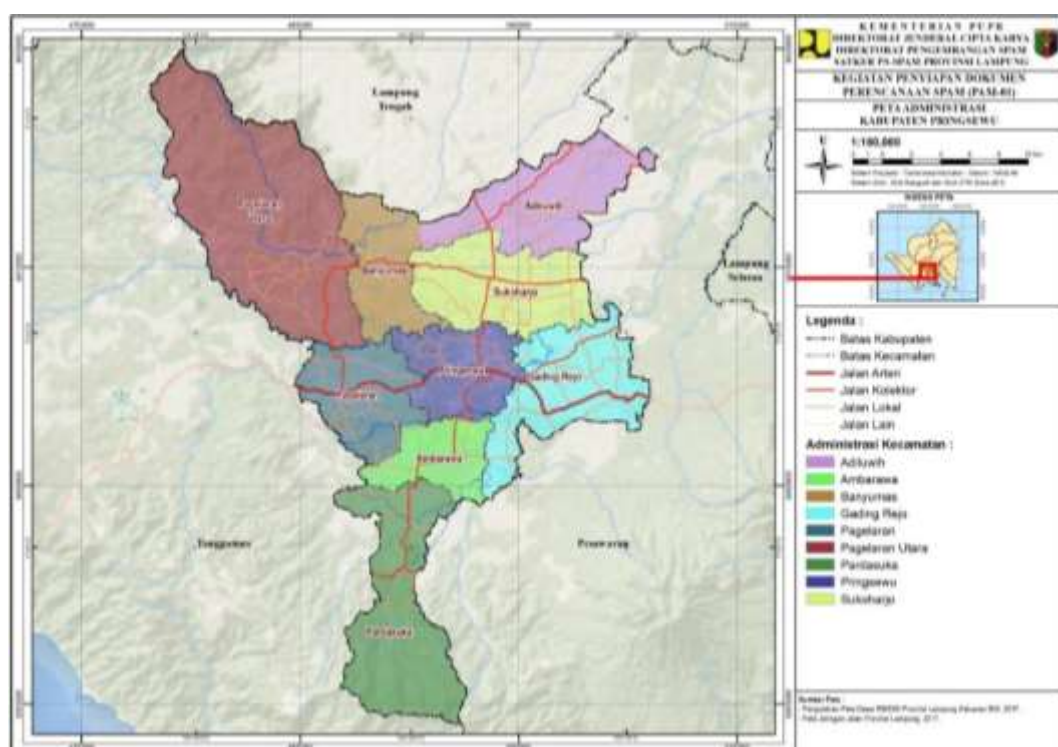
Secara Geografis, wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°46'-105°06' Bujur Timur dan antara 04°54' - 05°21' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Tengah .
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Ibukota Kabupaten Pringsewu dapat dicapai melalui perjalanan darat dari Kota Bandar Lampung dengan jarak kurang lebih 50 km ke arah barat. Luas wilayah Kabupaten Pringsewu sebesar 1.748,50 Km² meliputi 9 (Sembilan) wilayah kecamatan dan terdiri atas 5 kelurahan dan 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Pekon. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pringsewu dengan ibukota Pringsewu

2. Kecamatan Gadingrejo dengan ibukota Gadingrejo
3. Kecamatan Ambarawa dengan ibukota Ambarawa
4. Kecamatan Pardasuka dengan ibukota Pardasuka
5. Kecamatan Pagelaran dengan ibukota Gumuk Mas
6. Kecamatan Pagelaran Utara dengan ibukota Fajar Mulya
7. Kecamatan Banyumas dengan ibukota Banyumas
8. Kecamatan Adiluwih dengan ibukota Adiluwih
9. Kecamatan Sukoharjo dengan ibukota Sukoharjo



Sumber : RI-SPAM Kabupaten Pringsewu (2020-2040)

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

4.1.1 Topografi

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pringsewu berada di ketinggian 50 – 300 meter dari permukaan laut (dpl), dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran dan hanya sebagian kecil saja berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi kabupaten ini dibagi dalam 3 (tiga) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, bergelombang dan perbukitan. Sebagian besar

wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan daerah dengan kondisi topografi dataran rendah dengan ketinggian antara 50 hingga 100 mdpl. Sedangkan kondisi topografi bergelombang hingga berbukit dengan ketinggian 100 hingga 300 mdpl hanya terdapat di Kecamatan Pardasuka.

4.1.2 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pringsewu sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Pringsewu karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Pagelaran, Pardasuka, Pringsewu, Gadingrejo, dan Sukoharjo. Luas keseluruhan daerah aliran sungai Way Sekampung adalah 479.252 Km².

4.1.3 Kondisi Penduduk

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pringsewu yaitu 2.033 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Banyumas yaitu 50 jiwa/km². Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pagelaran Utara yaitu 15.695 jiwa sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pringsewu yaitu 83.216 jiwa. Secara lengkap data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	%	Jumlah penduduk	%	Kepadatan Penduduk / km2
1	Pardasuka	454,97	26,02	34.757	8,82	76,39
2	Ambarawa	84,27	4,82	34.592	8,78	410,49
3	Pagelaran	64,00	3,66	46.839	11,89	731,86
4	Pagelaran Utara	211,11	12,07	15.695	3,98	74,35
5	Pringsewu	40,92	2,34	83.216	21,13	2033,63
6	Gadingrejo	120,64	6,90	73.967	18,78	613,12
7	Sukoharjo	36,25	2,07	48.814	12,39	1346,59
8	Banyumas	409,17	23,40	20.746	5,27	50,70
9	Adiluwih	327,17	18,71	35.275	8,96	107,82
	Jumlah	1.748,50	100,00	393.901	100,00	225,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu 2018

4.2 Kelembagaan PDAM sebagai Sistem Ketersediaan Air Minum

4.2.1 Sejarah Singkat Pembentukan PDAM “Way Sekampung”

PDAM Pringsewu pada mulanya merupakan bagian dari PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus atau sejak berdirinya Kabupaten Tanggamus pada tahun 1997. Hingga akhirnya pada tahun 2009 Pringsewu resmi berpisah dari kabupaten induknya Tanggamus, yang otomatis PDAM di kedua wilayah inipun berpisah. Pemisahan aset PDAM sendiri terjadi pada bulan Agustus 2010.

Periode Agustus 2010 hingga Juli 2011 terjadi kekosongan pengelolaan SPAM di Kabupaten Pringsewu atau dengan kata lain PDAM berhenti beroperasi. Baru pada tanggal 25 Juli 2011 turunlah Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung. Pada saat ini manajemen PDAM Way Sekampung dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta Provinsi terus berusaha untuk meningkatkan jangkauan pelayanannya.

4.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

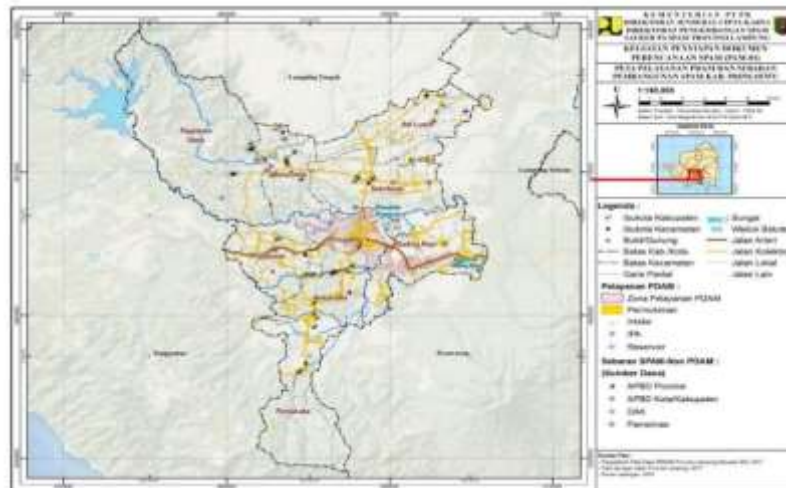
Menjadi perusahaan yang kuat di bidang finansial, dan sehat di bidang manajemen serta memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan.

b. Misi

1. Mengoptimalkan pelayanan prima terhadap pelanggan PDAM Way Sekampung.
2. Meningkatkan jumlah cakupan pelayanan serta meningkatkan jumlah pelanggan.
3. Meningkatkan jumlah pendapatan secara signifikan.
4. Memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Kabupaten Pringsewu.
5. Menekan angka kebocoran dan kehilangan air baik dari produksi sampai dengan ke pelanggan.
6. Memberikan kepuasan yang maksimal terhadap pelanggan.
7. Tanggap dan cepat terhadap pengaduan dan keluhan pelanggan.
8. Sehat, efektif dan efisien dalam penggunaan keuangan perusahaan.
9. Karyawan memiliki etos kerja yang tinggi.

4.2.3 Daerah Pelayanan

Sebelum Kabupaten Pringsewu berpisah dari kabupaten induknya Kabupaten Tanggamus, sebenarnya telah memiliki jaringan perpipaan air minum yang dikelola oleh PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus. Jumlah sambungan rumah (SR) yang ada di wilayah Sub PDAM Pringsewu yang pernah tercatat adalah 1772 sambungan tersebar di 4 kecamatan: Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo dan Banyumas.



Sumber : PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

Gambar 3. Peta Daerah Pelayanan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

Pada prakteknya jumlah tersebut mengalami pasang surut sampai akhirnya PDAM Pringsewu berhenti beroperasi pada bulan Agustus 2010 saat terjadinya pemisahan aset dengan PDAM Way Agung Tanggamus. tingkat pelayanan dari PDAM Pringsewu masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 6,84% dari penduduk perkotaan. Jumlah pelanggan PDAM Sub Cabang dari PDAM Induk Kabupaten Tanggamus sebelum terjadi pemekaran wilayah tahun 2008, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Pelanggan PDAM dan Jumlah Air Tersalurkan di Wilayah Kabupaten Pringsewu (Sebelum Pemekaran) Tahun 2008

No.	Cabang/Sub Cabang PDAM	Kapasitas Sistem (Lt/dt)	Jumlah Pelanggan	Banyaknya Air Tersalurkan (M ³)
1	Pringsewu	75	1.007	267.000
2	Gadingrejo	-	61	12.157
3	Ambarawa	-	0	0
4	Pardasuka	-	0	0
5	Pagelaran	-	0	0
6	Banyumas	5	150	12.892
7	Adiluwih	-	0	0
8	Sukoharjo	-	0	0
Jumlah		80	1.218	292.049

Sumber : PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

4.2.4 Sumber Air Baku dan Kapasitas Produksi

Saat ini sumber air PDAM Way Sekampung hanya mengandalkan Sungai Way Sekampung dengan Kapasitas Terpasang 75 lt/dt dan Kapasitas Produksinya 60 lt/dt. Pada area sekitar Intake Bumi Arum, sungai ini mempunyai lebar 43 meter dan kedalaman air rata-rata 5 meter (pada bulan Juli 2011). Debit pada musim kemarau sekitar 500 m³/detik atau 500.000 liter/dt. Jika sampai akhir proyeksi diperlukan 375 liter/dt maka masih lebih dari cukup kuantitas dan kontinuitas dari sungai ini.

Cara pengambilan air baku dengan menggunakan bangunan Intake tipe sodetan. Dari Intake air dipompa dengan menggunakan pompa submersible dialirkan menuju bak penampung sementara. Dari bak penampung dipompa lagi dengan pompa centrifugal menuju lokasi IPA (Instalasi Pengolah Air) yang berjarak kurang lebih 1270 meter dan beda tinggi 40 meter diatas lokasi Intake. Kondisi Intake Bumi Arum dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4. Sungai Way Sekampung.



Gambar 5. Intake Bumi Arum.

4.3 Kondisi SPAM PDAM Way Sekampung

a. PDAM Way Sekampung Unit Bumi Arum

Kapasitas terpasang IPA Bumi Arum adalah 25 lt/dt sebanyak 3 buah, jadi total 75 lt/dt. Sesuai dengan kebutuhan air di akhir perencanaan sebesar 250 lt/dt, maka diperlukan pembangunan IPA baru sebesar 175 lt/dt lagi yang perlu dibangun bertahap. Jika setiap 5 tahun sekali dilakukan pembangunan IPA baru maka pada tahap 5 tahun pertama perlu di bangun IPA dengan kapasitas 40-50 liter/dt.



Gambar 6. IPA Bumi Arum Kapasitas 3 x 25 Liter/dt.

1. Kinerja Unit Produksi

Uraian data unit produksi dan nama sumber air baku yang dikelola oleh PDAM dalam penyelenggaraan SPAM di Ibukota Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Kinerja Unit Produksi IPA Bumi Arum

No.	Nama Sumber	Lokasi IPA	Kap. Design Intake	Kap. Terbangun IPA	Kap. Intake	Kap. Produksi IPA	Kap. Idle (l/dt)
1	Way Sekampung	Ds. Bumi Arum	300 l/dt	75 l/dt	60 l/dt	25 l/dt	50 l/dt

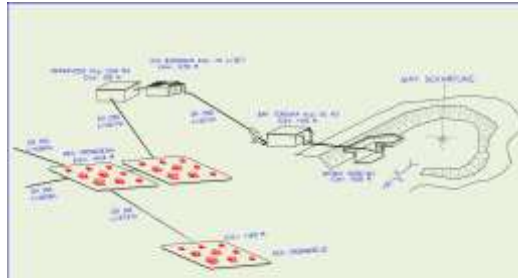
2. Reservoir Distribusi

Total volume reservoir Bumi Arum yang ada sekarang adalah 2 x 500 m³ jadi total kapasitas adalah 1000 m³. Bila dibandingkan dengan kapasitas instalasi ketersediaan air bersih terpasang yang sebesar 75 lt/dt, maka volume reservoir eksisting adalah 300 m³ lebih kecil dari kapasitas yang seharusnya 1.300 m³



Gambar 7. Reservoir Bumi Arum 2 x 500 m³.

Secara skematik, unit distribusi SPAM perkotaan Pringsewu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8. Skema Jaringan Unit Pringsewu.

Meskipun kapasitas terpasang unit produksi adalah 75 L/dt, tetapi perpipaan di dalam kota Pringsewu masih didominasi oleh pipa berdiameter 150 mm, sehingga dari uji *running program* komputer diketahui bahwa sistem distribusi maksimum hanya sanggup dialiri air sebesar 17.5 L/dt saja.

3. SPAM Ibukota Kecamatan (SPAM IKK)

Dimasa lalu, di wilayah Kabupaten Pringsewu memang mempunyai beberapa unit SPAM IKK. Tetapi kini tidak satupun yang bisa difungsikan. Masing-masing mempunyai masalahnya sendiri, yang dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. IKK Gadingrejo dengan sumber dari air tanah dalam (sumur bor). Beberapa tahun terakhir sumur bor amblas dan tidak bisa difungsikan lagi. Kapasitas semula 5 L/dt.
- b. IKK Pagelaran, sumur bor juga dan kondisinya hampir sama dengan IKK Gadingrejo. Kapasitas semula 5 L/dt.
- c. IKK Pardasuka mengambil air baku dari mata air dengan kapasitas 5 L/dt. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Tanggamus dari Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 90-an, terjadilah sengketa dimana mata air yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak boleh lagi digunakan sehingga sudah sejak lama jarimham IKK Pardasuka tidak beroperasi lagi.
- d. IKK Sukoharjo mengambil air baku dari Way Sekampung dengan kapasitas IPA 5 L/dt. Beberapa tahun belakangan sudah tidak berfungsi antara lain karena Genset dan IPA sudah tua dan tidak bisa diperbaiki lagi.
- e. IKK Banyumas kapasitas 5 L/dt dengan pengolahan IPA, barangkali inilah yang paling terakhir rusak.

b. SPAM IKK Banyumas

1. Unit Air Baku

Sumber air untuk IPA Banyumas mengambil sumber dari Way Wayah, dengan beda tinggi 5 meter di bawah elevasi IPA Banyumas. Pada titik intake, sungai ini mempunyai lebar 7 meter dengan kedalaman saat musim kemarau (Juli 2011) sekitar 1,5 meter. Debit minimum saat musim kemarau sebesar 5 m³/detik atau 5.000 liter/detik.

Intake eksisting Banyumas berupa intake sumuran memiliki hanya 1 kompartemen dengan ukuran :

- a. diameter 4.0 m
- b. tinggi 10.0 m

Bangunan intake Banyumas masih bisa dimanfaatkan untuk kapasitas pengembangan, hanya perlu bangunan proteksi tebing sungai di sekitar lokasi intake untuk menjamin keamanan bangunan intake itu sendiri.



Gambar 9. Kondisi Intake Banyumas saat ini.

Kapasitas pompa intake Banyumas yang hanya 5 liter/detik menggunakan pompa centrifugal dirasa tidak layak lagi untuk dikembangkan sebagai pemasok IPA yang perlu 90 liter/detik sampai akhir tahun proyeksi. Perlu penyesuaian pompa dan pipa transmisi baru untuk mendukung kebutuhan hingga akhir tahun proyeksi.

2. Unit Pengolahan

Kapasitas terpasang IPA Banyumas adalah 5 lt/dt dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pasir penyaring sudah hampir tidak ada, plate settler pada unit pengendap pengaitnya sudah putus, genset sudah lama rusak.

Padahal sesuai dengan kebutuhan air di akhir perencanaan untuk Zona 1 (Banyumas, Sukoharjo, Adiluwih) sebesar 90 lt/dt, maka diperlukan pembangunan IPA baru secara bertahap. Jika setiap 5 tahun sekali dilakukan pembangunan IPA baru maka pada tahap 5 tahun pertama perlu di bangun IPA dengan kapasitas 20-25 liter/dt.



Gambar 10. IPA Banyumas Kapasitas 5 Liter/dt.

3. Unit Reservoir Distribusi

Kapasitas reservoir Banyumas yang ada sekarang sebesar 40 m³. Bila dibandingkan dengan kapasitas instalasi ketersediaan air bersih terpasang yang sebesar 5 lt/dt, maka volume reservoir yang ada sekarang hanya sekitar 50% dari kapasitas yang seharusnya yaitu 86 m³.

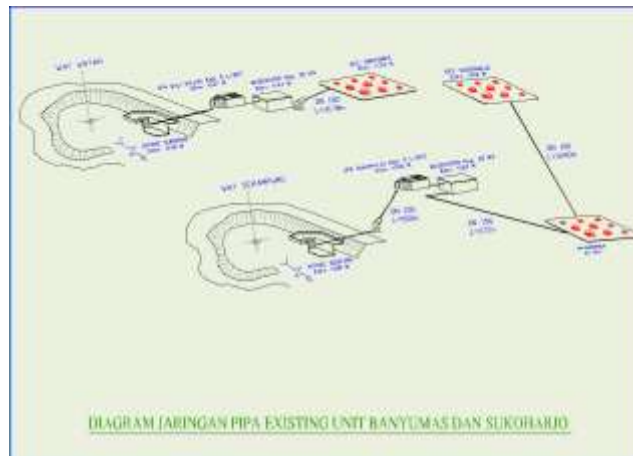


Gambar 11. Reservoir IPA Banyumas Kapasitas 40 m³.

Adapun di akhir tahun perencanaan, dengan kapasitas aliran 90 lt/dt, dan volume reservoir yang diperlukan sebesar 1.550 m³. Jadi dimasa yang akan datang masih diperlukan penambahan reservoir dengan volume 1.500 m³.

4. Unit Distribusi

Sistem hingga jaringan distribusi dari IKK Banyumas dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini.



Gambar 12. Skema Sistem Jaringan Perpipaan IKK Banyumas.

4.4 Gambaran Tarif

Gambaran Tarif Air Minum PDAM Way Sekampung dapat dilihat dibawah ini :

- a. Tarif Dasar : Rp. 3.200,-
- b. Tarif Rata-Rata : Rp. 3.200,-

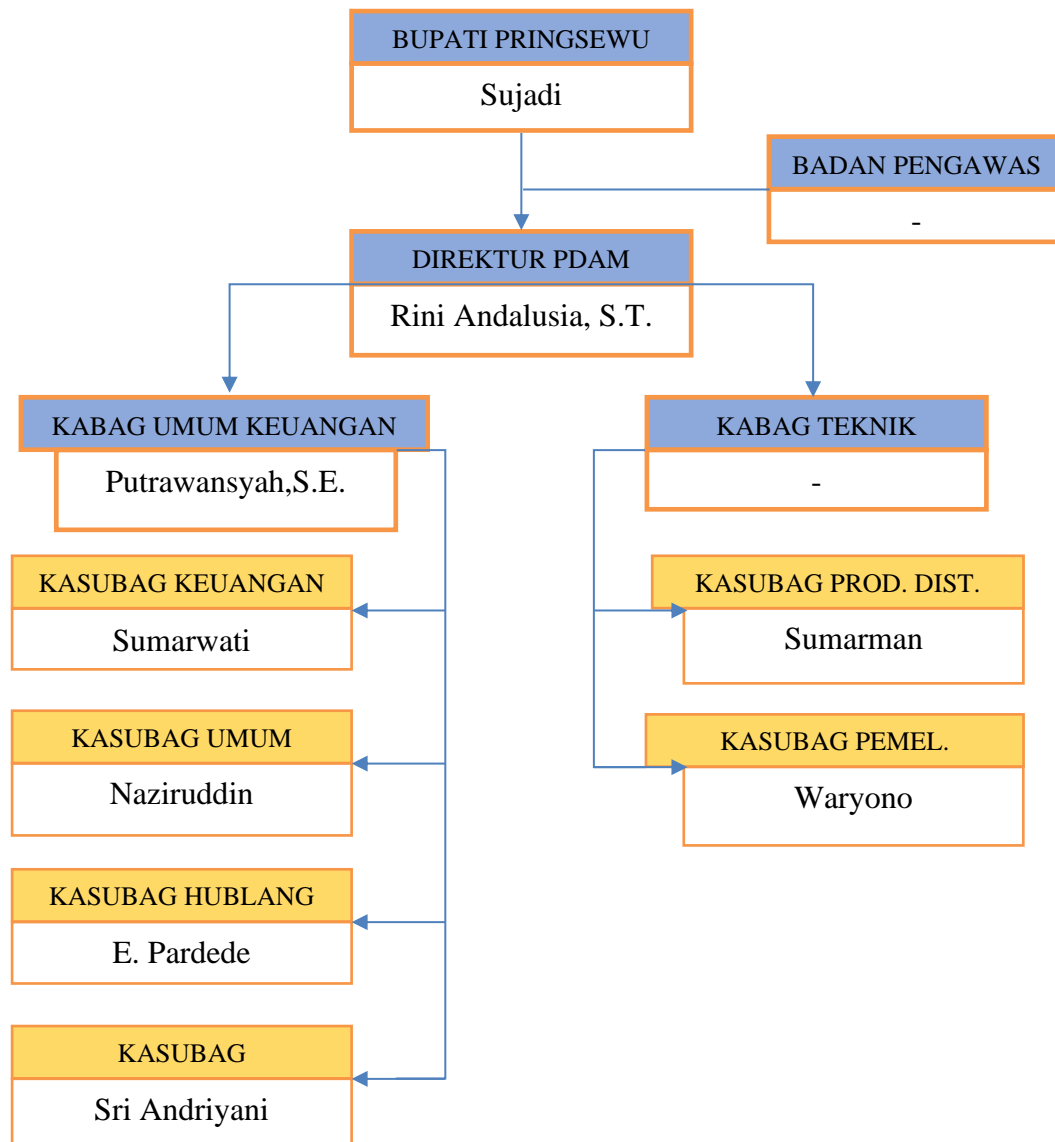
4.5 Kepegawaian dan Struktur Organisasi

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PDAM Way Sekampung seluruhnya ada 37 orang dan semuanya swasta murni tidak ada yang dari kalangan PNS. Rasio Pegawai PDAM Terhadap Jumlah Pelanggan : 1 orang : 37 pelanggan

b. Struktur Organisasi PDAM Way Sekampung

Organisasi pengelola sarana air minum di Kabupaten Pringsewu saat ini adalah PDAM Way Sekampung, baru terbentuk tahun 2011 tahun ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung. Struktur Organisasi dari PDAM Way Sekampung bisa dilihat pada diagram berikut.



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011

Gambar 13. Struktur Organisasi PDAM Way Sekampung Kab. Pringsewu

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berangkat dari bab hasil serta pembahasan maka dapat Peneliti simpulkan hasil penelitian ini, meliputi:

6.1.1 Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung

PDAM Way Sekampung hanya mampu menjangkau 2 (Dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan sumber air bersih hingga jarak dan waktu untuk mendapatkan air bersih yang terafiliasi jaringan perpipaan PDAM yang nyatanya belum mengakses seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 9 (Sembilan) kecamatan. Sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dapat disimpulkan belum merata. Inferensi yang diperoleh berdasarkan aspek kebijakan juga menemukan bahwa aksesibilitas air bersih masih memihak pada daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Diketahui kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo terpantau memiliki kepadatan penduduk yang lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain. Sehingga PDAM diduga mengabaikan pemerataan aksesibilitas dan cenderung memprioritaskan pada aspek kepadatan penduduk dibandingkan urgensi keterbatasan air bersih yang ada di kecamatan lain. Walaupun dari segi harga atau tarif yang dibayarkan cenderung murah seiring dengan kualitas air yang didapatkan belum maksimal, namun ketaatan pembayaran pelanggan juga masih menemui titik kelemahan, sehingga tambal sulam keuangan PDAM seiring sejalan proses produksi dan distribusi yang timpang.

6.1.2 Tata Kelola Air Bersih PDAM Way Sekampung

Aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih PDAM Way Sekampung belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerataan aksesibilitas harus mengacu pada tata kelola ketersediaan air bersih yang semestinya dilakukan PDAM Way Sekampung dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu. Jika ditinjau dari beberapa indikator berupa pendekatan (terbuka dan transparan, inklusif dan komunikatif, kebijakan dan realisasi koheren, adil dan etis), pada indikator pendekatan tersebut ditemukan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan kekurangan dalam semua indikator yang diketahui PDAM perlu berbenah secara manajemen internal untuk mampu memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pemerataan aksesibilitas air bersih sebagai wujud pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan dalam aspek pengoperasian (akuntabel, efisien, responsif dan berkelanjutan) juga belum menunjukkan pengelolaan yang maksimal, sehingga berdampak pada ketersediaan air bersih yang belum terdistribusi secara menyeluruh di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan realita ini, pelayanan ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu masih belum ditata dan dikelola dengan baik. Menggunakan konsep *water governance* yang Peneliti angkat dalam tesis ini memperlihatkan pemerintah Kabupaten Pringsewu utamanya PDAM Way Sekampung belum mengimplementasikan *water governance* dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan pada simpulan penelitian di atas, adapun saran yang perlu menjadi pertimbangan PDAM Way Sekampung guna mengoptimalkan perannya sebagai penyedia akses air bersih. Upaya ini dapat dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan berimplikasi terhadap kebijakan ketersediaan air bersih berupa manajemen pengelolaan air bersih yang lebih baik oleh Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu beserta PDAM. Maupun usulan mengenai sentralisasi tata kelola air atau tata kelola kelembagaan penyedia air bersih yang dapat diprivatisasi.

Selain itu, adanya penambahan anggaran untuk PDAM dapat meningkatkan proses operasional maupun distribusi utamanya dalam mengoptimalkan aspek pengoperasian (akuntabel, efisien, responsif dan berkelanjutan). Salah satu strategi yang dapat dilakukan PDAM dengan terus berupaya menambah sumber air bersih seperti yang telah diwacanakan yaitu Air Terjun Way Pagasan serta Bendungan Way Sekampung. Selain itu, guna mengoptimalkan indikator berupa aspek pendekatan (terbuka dan transparan, inklusif dan komunikatif, kebijakan dan realisasi koheren, adil dan etis) perlu adanya kerjasama dengan PDAM lain melalui Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) untuk berbagi cara menentukan langkah efektif dan strategi mengenai cara menambah jumlah pelanggan secara signifikan sehingga dapat mendongkrak kemampuan finansial PDAM Way Sekampung yang selama ini belum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggito, Albi, dan Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Badan Pusat Statistik. 2020a. *Indikator Perumahan Dan Kesehatan Lingkungan 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020b. *Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2020*. Pringsewu.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2019*. Jakarta.
- Black, J. 1981. *Urban Transport Planning*. London: Croom Helm.
- Echols, J. M. dan Shadily, H. 2006. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jaya, I. M. L. M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Jayadinata, Y. T. 1992. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah*. Bandung: ITB Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2017. “*Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup*.” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.
- Kenneth S. Borders dan Bruce B. Abbott. 2002. *Research Designs and Methods: A Process Approach (Fifth Edition)*. Boston: McGraw-Hill Company.
- Manzilati, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rochmah, S. 2013. *Responsivitas Pelayanan: Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih*. Malang. Universitas Brawijaya Press.
- Rogers. P. dan Hall A.W. 2003. *Effective Water Governance*. Swedia. Global Water Partnership.
- Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Bandung: Wahana Resolusi.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Aday, L.A. 1993. "Equity, Accessibility, and Ethical Issues: Is the U.S. Health Care Reform Debate Asking the Right Questions?". *Sage Journals*. 1 (Juli):724-740.
- Alihar, F. 2018. "Penduduk Dan Akses Air Bersih Di Kota Semarang (Population and Access to Clean Water in Semarang City)". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 13(Juni):67-76.
- Andhika, L.R. 2017. "Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 8(1): 41-55.
- Aprilia, dkk. 2020. "Analisis Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Dampit Dalam Menanggapi Pengaduan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Desa Pamotan, Ubalan, Dawuhan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)". *Jurnal Respon Publik* 14(5):1-13.
- Baas, D. 2020. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih Terhadap Kualitas Pelayanan Ketersediaan Air Minum". *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1.
- Effendi, S. 1995. "Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru. *Jurnal Prisma* (12). Jakarta: LP3ES.
- Herdini, F., dan A. Widiyarta. 2020. "Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk". 2(1):1-9.

- Howard, dkk. 2003. "Domestic Water Quantity, Service Level and Health" .*World Health Organization*.
- Kusumah, R.I. dan Mustofa, M.U. 2020. "Kajian Teoritis Water Governance untuk Pengelolaan Air Di Indonesia". *Jurnal JISIPOL*. Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 4, Nomor 1, April 2020. (29-51)
- Mochammad. 2018. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik". *Airlangga Development Journal* 2:36–49.
- Nur, dkk. 2018. "Analisis Pelayanan Publik Yang Pro Poor Pada Ketersediaan Air Bersih Perpipaan". *Jurnal Mega Aktiva*. Volume 7, Nomor 1, April 2018.
- Purwanto, E. W. 2020. "Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19". *The Indonesian Journal of Development Planning* IV.
- Rohmah, E. N. 2019. "Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris Dan Indonesia". *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11(1):34–43.
- Santoso, H. 2006. "Kebijakan Infrastruktur Air Bersih Dan Kemiskinan". *Jurnal Percik* 30.
- Taylor, dkk. 1975. "A Social Indicator of Access to Medical Care". *Journal of Health and Social Behavior*, Vol. 16, No. 1: 39-49.
- Yusnita. 2020. "Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Rawat Inap RSUD Pringsewu Lampung". *Jurnal Ilmiah Kesehatan* IX:98–102.

Website :

- ACT News. 2019. "ACT Lampung Distribusikan Air Bersih Di Pringsewu." Retrieved February 4, 2021 (<https://news.act.id/berita/act-lampung-distribusikan-air-bersih-di-pringsewu>).
- Ciptakarya.pu.go.id. 2020. "Masyarakat Pekon Sukamulya Lampung Kini Mudah Mengakses Air Minum." Retrieved February 4, 2021 (<https://ciptakarya.pu.go.id/v5/berita/detail/Ciptakarya/10591/Masyarakat-Pekon-Sukamulya-Lampung-Kini-Mudah-Mengakses-Air-Minum>).
- Lampost. 2021. "Penggunaan Air Meningkatkan Tiga Kali Lipat Selama Pandemi Covid-19." Retrieved February 22, 2021 (<https://m.lampost.co/berita-penggunaan-air-meningkat-tiga-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19.html>).

- Monevonline.com. 2020. "Pringsewu Toreh Anugerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat." Retrieved February 22, 2021 (<https://monevonline.com/pringsewu-toreh-anugerah-sanitasi-total-berbasis-masyarakat/>).
- Radar.com. 2020. "Duh, PDAM Way Sekampung Pringsewu Ternyata Kondisinya 'Masih Sakit'". Retrieved March 1, 2021 (<https://radarcom.id/2020/01/06/duh-pdam-way-sekampung-pringsewu-ternyata-kondisinya-masih-sakit/>).
- Regional.kompas.com. 2019. "Kekeringan, Warga Pringsewu Lampung Mandi 3 Hari Sekali." Retrieved February 4, 2021 (<https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/15374191/kekeringan-warga-pringsewu-lampung-mandi-3-hari-sekali?page=all>).
- Sumatera Post. 2019. "Kondisi SPAMS Pringsewu Rangka Pencapaian Target Universal Akses Air Minum 2019." Retrieved February 4, 2021 (<https://sumaterapost.co/kondisi-spams-pringsewu-rangka-pencapaian-target-universal-akses-air-minum-2019/>).

Prosiding :

- Abdi, S., dan Utomo., S 2019. "Sistem Pelayanan Air Bersih Di Perumahan Pucang Gading Dalam Mendukung Tercapainya Sustainable Development Goals." in . *Prosiding SENDI_U 2019*.

Tesis :

- Hakim, D. L. 2010. "Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat Di Permukiman Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang". Semarang. Universitas Diponegoro.
- Makhya, Syarief. 1997. "Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan (Studi Evaluasi tentang Dampak Kebijakan Kesehatan terhadap Aksesibilitas Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan : Kasus di Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas". Malang. Universitas Brawijaya